KOTAKITA

VOLUME XII, JANUARI 2016

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Setelah Pilkada Serentak...

Menuju Kota Cerdas

DEWAN PENGURUS
BESERTA DIREKTORAT EKSEKUTIF APEKSI

MENGUCAPKAN

Selamat Natal 2015
&
Tahun Baru 2016

Diterbitkan oleh:
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Alamat:
Rasuna Office Park III WO. 06-09,
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan,
DKI Jakarta, 12960, Indonesia
Telpon: +62-21 8370 4703
Fax: +62-21 8370 4733
http://www.apeksi.or.id

Penanggung Jawab: Ketua Dewan Pengurus Apeksi
Pemimpin Redaksi: Dr. Sarimun Hadisaputra, MSi
Wakil Pemimpin Redaksi: H. Soeyanto, Sri Indah Wibi Nastiti
Dewan Redaksi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin, MSi (Komwil - I, Kota Medan), Drs. Herman, H.N., MM. (Komwil - II, Kota Bandar Lampung), Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH. (Komwil - III, Kota Tangerang Selatan, dr. H. Samsul Ashar, Sp.Pd. (Komwil - IV, Kota Kediri), H.M. Riban Satia, S.Sos. (Komwil - V, Kota Palangkaraya), Drs. H. Burhan Abdurahman, MM (Komwil - VI, Kota Ternate), M. Abdurahman, Tri Utari dan Sukarno, Suharto, Mukhlisin
Iklan: Imam Yulianto
Administrasi & Distribusi: Teguh Ardhiwiratno

Menyambut Pergantian Tahun

Menuju
Kota Cerdas

Bagi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan masyarakat perkotaan di Indonesia, pergantian tahun dari 2015 ke 2016 diwarnai dinamika yang sangat penting dan strategis. Yang paling banyak menyedot perhatian adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang untuk tahap pertama digelar pada 9 Desember 2015. Hingga tutup tahun 2015, belum semua hasil pilkada bisa ditetapkan.

Pilkada serentak tahap pertama ini dilaksanakan di 269 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Dengan demikian, pada 2016 nanti akan ada 36 wali kota hasil pilkada serentak. Memang tak semua wajah baru. Sebab, banyak calon *incumbent* yang merupakan wali kota sebelumnya terpilih kembali. Meskipun begitu, sebagai hasil pilkada serentak yang pertama, banyak harapan para wali kota ini mampu mewarnai perkembangan pembangunan perkotaan di tahun-tahun mendatang. Bahkan mereka diharapkan menjadi kekuatan baru.

Topik hasil pilkada serentak itulah yang angkat dalam Rubrik *Laporan Khusus* dalam edisi kali ini. Ini juga dimaksudkan sebagai pembelajaran agar pelaksanaan pilkada serentak tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi.

Dalam Rubrik *Laporan Utama*, kami menurunkan topik tentang tren pembangunan kota cerdas di berbagai daerah di Indonesia. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, daerah-daerah saling berlomba untuk membangun kota cerdas (*smart city*). Memang sudah saatnya pembangunan perkotaan di Indonesia menerapkan konsep *smart city*. Sebab, permasalahan perkotaan di Indonesia sudah semakin kompleks karena sudah lebih dari separo populasi telah bermukin di kota – dan jumlahnya dipastikan akan terus meningkat. Topik ini kami angkat agar penerapan konsep *smart city* dalam pembangunan wilayah perkotaan semakin padu, terintegrasi, dan komprehensif demi mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Dalam Rubrik *Wawancara*, kami menurunkan hasil wawancara dengan CEO *Citiasia Inc* Farid Subkhan guna melengkapi *Laporan Utama*. *Citiasia Inc* merupakan salah satu lembaga yang menginisiasi gerakan membangun Indonesia cerdas melalui daerah cerdas, dan telah melakukan survei, analisa, dan pengukuran indeks kota cerdas. Dengan demikian, Farid Subkhan bisa berbagi pengetahuannya tentang peta dan perkembangan kota cerdas di Indonesia, termasuk kendala-kendalanya.

Pada rubrik-rubrik lain, Majalah *Kota Kita* juga menurunkan berbagai laporan yang penting dan menarik seputar dinamika perkotaan di Indonesia. Termasuk, rencana Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2016 di Kota Jambi. Dalam Munas tersebut juga akan dipilih Ketua Umum APEKSI yang baru.

Selamat membaca, dan selamat tahun baru 2016. K

Menuju Kota Cerdas

Isu *smart city* (kota cerdas) mulai mewarnai pembangunan perkotaan di Indonesia. Diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk membangun kota cerdas.

Pada tahun 2015 ada dua penganugerahan penghargaan *smart city* yang cukup menyedot perhatian di Indonesia. Ini menunjukkan gejala bahwa pembangunan perkotaan di Indonesia ke depan mengarah pada konsep *smart city*. Penganugerahan penghargaan *smart city* yang pertama dilakukan pada Agustus, dan yang kedua pada Oktober.

Penganugerahan yang pertama bertitel Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 yang diselenggarakan Harian *Kompas* bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan didukung PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Acara yang berlangsung di Grand Ballroom, Hotel Shangri-La, Jakarta, ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Yang kedua penghargaan bertitel Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015 diinisiasi oleh *Citiasia Inc*. Acara ini diselenggarakan di Hotel JS Luwansa Jakarta, dan dihadiri Ketua DPD RI Irman Gusman dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung.

Semua pemberian penghargaan tersebut didahului dengan survei, analisis, dan pengukuran terhadap indikator-indikator pencapaian kriteria sebagai kota cerdas selama beberapa bulan sebelumnya. Kegiatan tersebut melibatkan para pakar berbagai bidang yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Kegiatan ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa, seperti di negara-negara berkembang lainnya, semakin banyak penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Pada 2015, misalnya, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan sudah mencapai 53,3 persen dari total populasi dan akan terus terjadi peningkatan signifikan pada tahun-tahun mendatang. Tentu saja ini akan menyebabkan permasalahan perkotaan semakin kompleks. Itulah kenapa pembangunan perkotaan harus diarahkan pada konsep kota cerdas.

Pengukuran

Pada penganugerahan IKCI 2015, yang dianalisa dan diukur meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengukuran tersebut, misalnya,sebuah kota dianggap bisa menerapkan konsep cerdas dari sisi ekonomi bila perekonomian dikelola dan berjalan dengan baik. Begitu juga dari aspek sosial, sebuah kota dinilai berhasil jika masyarakat bisa menikmati keamanan, kemudahan, dan kenyamanan. Misalnya, warga mendapatkan layanan kesehatan, transportasi, serta layanan publik lainnya yang mudah diakses dan layak. Dari sisi lingkungan, kota dianggap cerdas jika bisa menyediakan hunian yang sehat, pengelolaan energi dengan prinsip hemat, dan kesesuaian tata ruang. Dalam konsep kota cerdas, pengelolaan ketiga aspek tersebut harus didukung teknologi informasi komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia (SDM) yang baik. Ketiga hal yang disebut terakhir ini merupakan aspek enabler yang juga dipertimbangkan dalam penilaian. Enabler adalah hal-hal yang dianggap bisa mempercepat munculnya inovasi dan solusi cerdas bagi sebuah kota.

Sementara itu, pada penganugerahan (ISNA) 2015, digunakan dua indeks penyusun, yaitu indeks kesiapan menuju daerah cerdas (*Smart Readiness Index*) dan indeks kinerja daerah pintar (*Smart Region Index*). Dalam *Smart Readiness Index*, terdapat lima dimensi yang diukur, yaitu sumber daya alam (*nature*), struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan kultur suatu kota. Sedangkan, dalam *Smart Region Index* terdapat enam dimensi yang diukur, yaitu dimensi *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment*.

Dalam IKCI 2015, data sekunder dari 93 kota otonom yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan enabler dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga ditambah dengan data dari pemerintah kota diolah untuk dilakukan analisa dan pengukuran. Kota dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kategori kota berpenduduk sampai dengan 200.000 jiwa, kota berpenduduk di atas 200.000 sampai dengan 1 juta jiwa, dan kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hasilnya seperti tampak dalam tabel.

Kota Cerdas Versi IKCI 2015

Kota Berpenduduk di Atas 1 Juta		
Juara	**Kota**	**Provinsi**
1	Surabaya	Jawa Timur
2	Tangerang	Banten
3	Bandung	Jawa Barat
4	Depok	Jawa Barat
5	Semarang	Jawa Tengah
Kota Berpenduduk 200.000 hingga 1 Juta		
Juara	**Kota**	**Provinsi**
1	Yogyakarta	DIY
2	Balikpapan	Kalimantan Timur
3	Surakarta	Jawa Tengah
4	Pontianak	Kalimantan Barat
5	Malang	Jawa Timur
Kota Berpenduduk hingga 200.000		
Juara	**Kota**	**Provinsi**
1	Magelang	Jawa Tengah
2	Madiun	Jawa Timur
3	Bontang	Kalimantan Timur
4	Mojokerto	Jawa Timur
5	Salatiga	Jawa Tengah

Suasana salah satu sudut Kota Surabaya

Berbeda dengan IKCI 2015, pengukuran ISNA 2015 dilakukan kepada 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan data terpublikasi (*published data*) dari berbagai sumber, seperti dari data kementerian/lembaga, statistik wilayah seluruh Indonesia, *web* resmi pemerintah daerah, dan analisis 72 media cetak nasional dan lokal serta 100 media *online*. Artinya, ruang lingkup pengukuran ISNA bukan hanya kota otonom, melainkan juga perkotaan di kabupaten dan provinsi. Karena itu, sebutannya bukan *smart city index*, melainkan *smart region index*. Hasil pengukurannya seperti terlihat dalam tabel berikut:

Smart Region Versi ISNA 2015

Provinsi Besar (Populasi > 5 juta)	**Provinsi Sedang (Populasi 2-5 juta)**	**Provinsi Kecil (Populasi 1 Juta)**
1. Jawa Barat	1. Bali	1. Kepri
2. Jawa Timur	2. DI Yogyakarta	2. Gorontalo
3. DKI Jakarta	3. Nusa Tenggara Barat	3. Kepulauan Babel
4. Jawa Tengah	4. Aceh	4. Bengkulu
5. Banten	5. Kalimantan Selatan	5. Maluku
Kabupaten Besar (Di Atas 1 Juta)	**Kabupaten Sedang (300 ribu -1 juta)**	**Kabupaten Kecil (Di Bawah 300 ribu)**
1. Bogor	1. Bantul	1. Bintan
2. Sleman	2. Badung	2. Mukomuko
3. Tangerang	3. Semarang	3. Lampung Barat
4. Banyuwangi	4. Gianyar	4. Klungkung
5. Bandung	5. Boyolali	5. Pohuwato

Kota Besar (Di Atas 800 Ribu)	Kota Menengah (300-800 Ribu)	Kota Kecil (Di Bawah 300 Ribu)
1. Surabaya	1. Surakarta	1. Batu
2. Bandung	2. Yogyakarta	2. Pasuruan
3. Semarang	3. Cimahi	3. Madiun
4. Bekasi	4. Cirebon	4. Blitar
5. Depok	5. Balikpapan	5. Bontang

Baik dari versi IKCI maupun ISNA, terdapat nama-nama kota yang sama yang memperoleh predikat kota cerdas meskipun indikator pengukurannya berbeda. Misalnya, Kota Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, atau Balikpapan. Beberapa nama yang sama juga muncul dalam raihan indeks tertinggi kota cerdas di tingkat Asia Tenggara.

Pada 29 September 2015, misalnya, dalam *Microsoft CityNext Summit 2015* yang diselenggarakan di Singapura, 4 kota di Indonesia dinobatkan sebagai "Kota Sekunder Pintar" atau "*Smart Secondary City*" di Asia Tenggara. Keempat kota tersebut adalah Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yang dimaksud kota sekunder adalah kota berpenduduk minimal 200 ribu orang dan bukan merupakan ibu kota negara dan bukan kota satelit. Ada tiga indikator yang dinilai, yang menyangkut aspek kepemimpinan, partisipasi publik, dan infrastruktur.

Integratif dan Komprehensif

Dari berbagai penganugerahan tersebut, menunjukkan bahwa tren pembangunan perkotaan di Indonesia sudah mengarah pada konsep *smart city*. Namun, seperti diakui *Chief Executive Officer* (CEO) Citiasia Inc Farid Subkhan, pembangunan kota cerdas di Indonesia masih parsial belum seperti konsep idealnya. "Belum ada *masterplan* kota cerdas yang dijadikan contoh model baku," ujarnya.

Di Indonesia memang tidak ada regulasi khusus yang mengatur pengembangan konsep kota cerdas. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo-no, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah berniat menyu-sun peraturan pembangunan perkotaan yang rencananya akan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga terjadi pergantian kepemimpinan nasional, rencana itu belum terwujud. Saat ini, salah satu yang bisa dijadikan dasar hukum penerapan konsep kota cerdas adalah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pasal-pasal yang mengatur ketentuan inovasi daerah.

Karena itulah, penerapan konsep kota cerdas antara satu kota dengan kota lain, antara satu daerah dengan daerah lain, bisa berbeda-beda. Bahkan, indikator penilaian indeks kota cerdas pun berbeda-beda, seperti yang terjadi pada versi IKCI, ISNA, maupun *Microsoft CityNext Summit*.

Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, misalnya, pengembangan konsep *smart city* difokuskan pada pelayanan publik dan penataan birokrasi. Salah satu hasil perbaikan pelayanan publik adalah program *Hospital Online Reservation* atau HORE. Program ini hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, STMIK Balikpapan, dan operator XL Axia-ta. Lewat program HORE, warga dapat mengecek ketersediaan kamar di rumah sakit secara *online* lewat internet. Di bidang penataan birokrasi, Pemerintah Kota Balikpapan berencana mengadopsi aplikasi kinerja pegawai yang sukses diterapkan di Kota Surabaya. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan Pemko Balikpapan. "Balikpapan harus dikelola dengan lebih cerdas lagi," begitu pernah ditegaskan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi medio November 2015.

Lain lagi dengan Kota Malang di Jawa Timur. Penerapan konsep kota cerdas di Kota Malang lebih fokus pada pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, Pemko Malang bekerja sama dengan salah satu kota di Kroasia, yaitu Parastin, dalam bentuk *sister city*. "Ini terobosan yang kami lakukan," ujar Wali Kota Malang Mochamad Anton. K

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menerima penghargaan Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2015, (20/10/2015) di Jakarta.

Kota Cerdas Adalah....

Suasana kawasan tepian Sungai Kapuas, Pontianak.

Balikpapan termasuk salah satu kota di Indonesia yang memiliki perencanaan cukup baik dalam penerapan konsep *smart city*. Bagaimana hasilnya?

Sesungguhnya, konsep *smart city* atau kota cerdas pertama kali diperkenalkan oleh IBM, perusahaan komputer ternama di Amerika Serikat. Konsep ini diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Ada enam indikator yang dijadikan tolok ukur kota cerdas. Keenam indikator *smart living, smart environment* (lingkungan), *smart utility* (ultilitas/prasarana), *smart economy* (ekonomi), *smart mobility* (mobilitas), dan *smart people* (manusia, masyarakat). Namun, dalam perkembangannya, terjadi adopsi dan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penduduk suatu kota.

Belakangan, salah satu pakar konsep *smart city* dunia, Boyd Cohen, juga mengembangkan konsep *smart city* dengan 6 indikator yang tak jauh berbeda dengan yang diperkenalkan IBM. Keenam indikator Boyd Cohen adalah *smart people* (masyarakat cerdas), *smart environment* (lingkungan cerdas), *smart government* (pemerintahan cerdas), *smart living* (hidup yang cerdas), *smart economy* (ekonomi cerdas), dan *smart mobility* (mobilitas cerdas).

Tampaknya, pembangunan *smart city* yang dirancang Pemerintah Kota (Pemko) Balikpapan mengadopsi konsep tersebut. *Smart city* Kota Balikpapan diawali dengan pembangunan *smart governance* dan *smart people*. Di sini, pemerintah menjadi inisiator sekaligus pelaku utama dalam mewujudkan *smart city*.

Pembangunan *smart governance* dimaksudkan sebagai komitmen Pemko Balikpapan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pengembangan *smart governance* dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang cerdas (*smart policy*), program yang cerdas (*smart program*), dan pelayanan yang cerdas (*smart service*). Selanjutnya, yang dikembangkan adalah *smart people* atau masyarakat pintar. Dengan itu, yang akan dibangun bukan hanya masyarakat yang hanya dapat bekerja untuk memuhi kebutuhan naluri tubuh seperti makan dan tidur, akan tetapi manusia yang dapat bekerja dan berpikir tanpa ada batasan waktu dan ruang. Untuk itu dilakukan melalui dua cara, yaitu menciptakan masyarakat berperilaku cerdas (*smart behavior*) dan masyarakat berbudaya cerdas (*smart culture*).

"Kota cerdas yang kamu usung bukan hanya mengarah kepada pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, dalam mewujudkan kota cerdas, Pemko Balikpapan lebih mengutamakan pada *smart policy*, karena akan berpengaruh langsung terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Balikpapan," ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Meskipun begitu, saat ini pelayanan publik di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Balikpapan sudah berbasis teknologi informasi. Dan, terobosan itulah yang membuat Balikpapan tercatat sebagai salah satu yang terdepan dalam mengembangkan konsep *smart city*.

Pelayanan perizinan di Kota Malang.

Kota Malang, Inovasi Menuju *Smart City*

Dengan berbagai inovasi, Kota Malang telah bergerak menuju *smart city*. Bagaimana hasilnya?

Kota Malang tercatat sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang sedang mempersiapkan diri menjadi kota cerdas (*smart city*). Untuk itu, kota dengan *branding "Beautiful Malang"* ini telah melakukan berbagai inovasi. Salah satu hasilnya, Kota Malang menjadi *role model* perbaikan pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 54 jenis perizinan, termasuk di dalamnya adalah Pelayanan Perizinan Paralel (PPP). PPP dikembangkan untuk mendorong investasi daerah dan meningkatkan ketaatan legalitas usaha masyarakat. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui Program Nasional Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) hingga ke Kelurahan. Berkat inovasinya ini, Kota Malang memenangi Lomba Kelurahan Tingkat Nasional.

Terobosan lain yang dilakukan Wali Kota Malang Mochamad Anton adalah menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk ini, Pemerintah Kota (Pemko) Malang melibatkan 54 perguruan tinggi yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang tersebar di 57 kelurahan. Inilah yang

mendorong ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Malang terus berkembang. "Di saat ekonomi global lesu, justru pelaku ekonomi kerakyatan di Kota Malang menikmati hasilnya," ujar Anton. Sebab, mereka menggunakan bahan baku lokal, termasuk barang limbah, sementara produknya untuk pasar ekspor.

Kota Malang juga punya terobosan untuk membangun lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemko Malang telah mengeluarkan 11 peraturan daerah, mulai dari penanganan limbah, sampah, konservasi air, ruang terbuka hijau (RTH), hingga tata ruang. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya, dilakukan melalui pengelolaan persampahan, RTH, pengendalian kualitas air dan udara, inovasi dan pelibatan masyarakat, serta bagaimana mempersiapkan masa depan. "Ini bukti komitmen kami terhadap masalah yang ada, dan kami lakukan sejak 2012. Dengan begitu, Kota Malang bebas dari daerah kumuh, air kumuh, dan sanitasi harus selesai 100 persen 2019. Ini untuk mendukung *smart city*," Anton menjelaskan.

Salah satu kendala dalam mewujudkan *smart city*, diakui Anton, adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Namun, sebagai kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha, Anton tidak merasa mengalami kesulitan mengatasi kendala ini. Yang pertama dilakukan adalah mengubah pola pikir (*mind set*) aparat atau PNS, dari lingkungan Pemko Malang sampai ke kelurahan. "Harus diubah dari sikap mental minta dilayani menjadi pelayan masyarakat," ujar Anton. Perubahan birokrasi, menurut Anton, memang harus dimulai dari pola pikir. Dari sisi keuangan, hasilnya sudah mulai terasa. Melalui perubahan pembayaran dari sistem manual ke *online*, terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari Rp 100 miliar menjadi Rp 360 miliar.

Wali Kota Malang Mochamad Anton.

Terobosan juga diambil Anton untuk membangun taman dan ruang hijau di Kota Malang. Pembangunannya tidak menggunakan APBD, melainkan dana CSR. Dana APBD yang terbatas bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan infrastruktur dan menggerakkan ekonomi rakyat. Alhasil, sedikitnya ada 12 taman yang dibiayai dana CSR. "Ini pemikiran dan cara yang jarang dilakukan daerah lain, melibatkan dana pihak ketiga untuk pembangunan," terangnya.

Saat ini, semua aktivitas dan kegiatan di Kota Malang bebasis informasi dan teknologi (IT). Seperti, untuk memantau lalu lintas, ke depan tidak ada polisi lalu lintas berjejer di jalan, tetapi cukup menggunakan CCTV. Ketika ada kejadian atau bahaya, polisi langsung bisa mengatasi. Semua berbasis IT, seperti yang diterapkan di Singapura. "Saya yakin, dengan apa yang kita inovasikan, pastilah kita mampu mencapai *smart city* itu," ujar Anton. K

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Krisnadi sedang meninjau pelayanan publik di Kota Malang.

Pelayanan kesehatan kepada lansia di Kota Samarinda

Kota-kota Sehat 2015

Menjelang akhir tahun, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada 141 kabupaten/kota sehat 2015. Indikatornya adalah kebijakan yang mendorong masyarakat memiliki kesadaran hidup sehat. Ini juga merupakan bagian untuk menjadi kota cerdas. Berikut profil sebagian kota sehat 2015.

Menjadi bagian dari puncak acara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke -51 tahun 2015 adalah pemberian penghargaan Kota Sehat 2015. Puncak HKN yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, akhir November 2015. Pengharhaan Kota Sehat terdiri dari tiga kategori, yaitu *Swasti Saba Wistara, Swasti Saba Wiwerda,* dan *Swasti Saba Padapa*. Penghargaan diberikan kepada kabupaten/kota yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan kabupaten/kota sehat. Pada 2015, terdapat 141 kabupaten/kota yang meraih penghargaan tersebut, jauh lebih banyak dari tahun 2013 yang berjumlah 98 kabupaten/kota.

Ketika memberikan sambutan dalam acara tersebut, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, mengatakan, indikator penilaian pengembangan kabupaten/kota sehat antara lain berupa penerapan secara konsisten dan berkelanjutan pendekatan kabupaten/kota sehat yang berkaitan dengan tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat, dan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.

"Penerapan pendekatan ini sangat penting dalam mengantarkan suatu wilayah bersama masyarakat menuju kabupaten sehat atau kota sehat dengan penduduk yang hidup dalam kondisi bersih, nyaman, aman, dan sehat," ujar Menteri Kesehatan. Menkes juga berharap agar di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi kabupaten/ kota yang berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi ini. "Sebab kebupaten/ kota yang meraih penghargaan setinggi ini adalah kabupaten/kota yang

benar-benar mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.

Salah satu kota yang menerima penghargaan *Sawastisaba Wistara* adalah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Samarinda Meiliana. Menurut Meiliana, penghargaan kota sehat tertinggi ini diraih tidak dengan mudah. Ada tujuh tatanan atau variabel sebagai kota sehat berhasil diwujudkan Kota Samarinda dari minimal lima tatanan yang ditetapkan panitia, yakni kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, dan kawasan pariwisata sehat, kawasan pertambangan sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kehidupan sosial yang sehat.

"Penghargaan yang begitu susah dan penuh perjuangan ini perlu kita pertahankan," ujar Meiliana. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja keras dan mendukung sehingga dapat meraih penghargaan tersebut. Karena penghargaan ini diberikan dua tahun sekali, ia juga berharap agar masyarakat Kota Samarinda dapat mempertahankannya pada 2017.

Sementara itu, meskipun sempat diterpa berita kasus gizi buruk, Kota Bitung mampu mempertahankan predikat Kota Sehat. Kota Bitung pada 2015 ini juga menerima penghargaan *Swasti Saba Wistara*. Yang menerima di Jakarta Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung Vonny Dumingan.

"Atas nama Pemerintah Kota Bitung, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai Kemenkes, Forum Bitung Kota Sehat (FKS), serta seluruh warga Kota Bitung yang memberikan dukungan sehingga penghargaan ini bisa kami terima," ujar Vonny Dumingan usai menerima penghargaan.

Selanjutnya, dari Sumatera Barat, tercatat Kota Padang juga meraih penghargaan Kota Sehat 2015. "Alhamdulillah, setelah meraih sertifikat Adipura 2015, kita mendapat penghargaan kota sehat. Ini diperoleh setelah kita memenuhi sembilan variabel yang ditetapkan," ujar Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Bagi Mahyeldi, penghargaan ini membuktikan bahwa program di bidang kesehatan, khususnya pelayanan masyarakat, telah berjalan dengan baik. "Penghargaan ini juga cukup berkaitan juga dengan sertifikat Adipura yang sudah kita peroleh," ujarnya.

Salah satu pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh.

Masih dari Sumatera Barat, Kota Payakumbuh kembali berhasil mempertahankan predikat Kota Sehat. Hanya berselang empat hari setelah menerima Piala Adipura, kota berpenduduk sekitar 130 ribu jiwa ini berhasil merebut penghargaan tertinggi dalam klasifikasi Kota Sehat. "Alhamdulillah, Payakumbuh memperoleh penghargaan paling bergengsi Kota Sehat," ujar Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi

Kota Payakumbuh sudah dua kali menerima penghargaan tersebut. Sementara itu, dua kategori lainnya, juga sudah dipetik Payakumbuh. Totalnya, Payakumbuh sudah empat kali memperoleh penghargaan Kota Sehat sejak 2006. Menciptakan Kota Sehat, menurut Riza Falepi, memerlukan komitmen seluruh masyarakat, bukan hanya kemauan keras jajaran pemerintah. Banyak faktor yang harus dipenuhi, seperti masalah penataan, kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.

"Gelar Kota Sehat ini kami persembahkan kepada seluruh warga kota dan *stakeholder*," ucap Wali Kota.

Yang juga berhasil meraih penghargaan Kota Sehat 2015 adalah Kota Tomohon. Kota berjuluk Kota Bunga ini dua kali mendapatkan penghargaan Kota Sehat kategori *Swastisaba Wiwerda*. Di Jakarta, yang menerima penyerahan penghargaan adalah Sekretaris Kota Tomohon Arnold Poli. "Ini merupakan kategori penghargaan kedua di bidang kesehatan," ujar Kepala Humas Pemko Tomohon Herri Lantang.

Meskipun begitu, menurutnya, Pemko Tomohon bertekad akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Setelah ditetapkan Tomohon sebagai penerima penghargaan Kota Sehat, Pemko Tomohon bertekad akan tetap meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah akan membangun fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya," ujar Herri.

Untuk kelima kalinya, Kota Manado dari Provinsi Sulawesi Utara menerima penghargaan Kota Sehat. Selama masa kepemimpinan Vicky Lumentut dan Harley Mangindaan, Kota Manado sudah tiga kali berturut-turut menerima penghargaan Kota Sehat, yaitu mulai 2011, 2013, dan 2015. Manado dinilai sebagai kota yang memiliki banyak program unggulan di bidang kesehatan. Salah satunya program perlindungan rakyat semesta yang dikenal sebagai Program UC, di mana seluruh warga Kota Manado, yang tidak ditanggung jaminan apa pun, dapat berobat gratis.

Itulah contoh beberapa kota yang memperoleh predikat Kota Sehat 2015. Predikat tersebut akan menjadi modal yang besar bagi kota-kota tersebut untuk berkembang menjadi kota cerdas.

Angkutan Umum di Kota Palembang.

Transportasi Kota Terbaik 2015

Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil dalam pembangunan sistem transportasi di Istana Negara, 23 Desember 2015. Sejumlah kota dinilai telah memiliki sistem transportasi yang baik.

Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) yang terdiri empat kategori, yakni Kota Raya, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil. Pada 2015 ini, penghargaan tertinggi, yaitu Piala Wahana Tata Nugraha Kencana diraih Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Adapun, untuk kategori Kota Raya diberikan kepada Kota Bandar Lampung dan Kota Bandung. Kategori Kota Besar diberikan kepada Kota Pekanbaru, Padang, Solo, Denpasar, dan Balikpapan. Semantara itu, kategori Kota Sedang diberikan kepada Kota Purwokerto dan Kota Probolinggo. Sedangkan, kategori Kota Kecil diberikan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Jepara, Tabanan, Tabalong, dan Bantaeng.

Saat memberikan sambutan, Presiden berharap penghargaan tersebut bukan sekadar seremonial belaka, tetapi berdampak pada adanya langkah perbaikan dalam pelayanan transportasi publik, khususnya transportasi darat. Sebab, rakyat membutuhkan sarana transportasi dalam berbagai kegiatan seperti ke sekolah, ke tempat bekerja, dan untuk distribusi barang. “Sehingga, keberhasilan pemberian layanan di bidang transportasi publik akan berkontribusi pada kemajuan bangsa,” tegas Presiden.

Bagi Kota Surakarta, penghargaan WTN kali ini merupakan yang kesembilan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajad, penghargaan ini akan dijadikan penyemangat untuk meningkatkan dan menciptakan sarana transportasi publik yang lebih baik di Kota Surakarta. “Kontribusi masyarakat dan seluruh *stakeholder* sangat besar dalam upaya memperbaiki sistem transportasi publik di Kota Surakarta,” ujarnya.

Sementara itu, ini merupakan kali kelima Kota Tegal menerima penghargaan WTN. Sebelumnya, 2010 dan 2011, Kota Tegal menerima plakat WTN. Sementara di 2013 dan 2014 mendapatkan piala/tropi WTN katagori lalu lintas. Pada 2015, Kota Tegal menjadi salah satu dari 40 kota sedang di Indonesia yang mendapatkan WTN. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno menerima langsung penyerahan WTN dari Presiden.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tegal Johardi, menyebutkan, penghargaan WTN kali ini membuktikan Pemko Tegal telah melakukan penataan transportasi publik dengan baik. “Upaya perbaikan transportasi publik berjalan baik, utamanya untuk keselamatan pengguna jalan, termasuk dalam penyediaan anggaran dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Kota Pekalongan juga kembali meraih penghargaan WTN kategori Kota Sedang, dan ini yang keempat kalinya. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan (Dishubparbud) Kota Pekalongan Doyo Budi Wibowo, mengatakan, penghargaan WTN tersebut menunjukkan keberhasilan Kota Pekalongan dalam pengelolaan lalu lintas, baik dalam penyediaan infrastruktur jalan, sarana prasarana lalu lintas, maupun sumber daya manusianya. “Ini tak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Farid Subkhan, CEO Citiasia Inc:

"Indonesia Cerdas Dimulai dari Daerah Cerdas"

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah berlomba mewujudkan atau membangun *smart city* atau kota cerdas melalui berbagai program. Sebagai ikutannya, banyak diselenggaraan penilaian disertai pemberian penghargaan atas pencapaian membangun *smart city* di daerah. Salah satunya adalah *Indonesia Smart Nation Award* (ISNA) yang diinisiasi oleh Citiasia Inc, lembaga independen yang melakukan pendampingan terhadap upaya-upaya pembangunan *smart city* (kota cerdas) atau *smart region* (daerah cerdas).

Untuk mengetahui sejauhmana daerah-daerah di Indonesia benar-benar siap bertransformasi menuju kota cerdas, Majalah *Kota Kita* mewawancarai Farid Subkhan, CEO Citiasia Inc. Berikut petikannya:

Belakangan banyak daerah mencanangkan pembangunan kota cerdas. Fenomena apa ini? Arahnya ke mana?

Membangun Indonesia pintar atau Indonesia cerdas memang harus dimulai dari daerah. Kalau semua daerah cerdas, semua kota cerdas, maka secara nasional juga akan terwujud Indonesia cerdas.

Bagaimana dan dari mana memulainya?

Smart city adalah bagaimana membuat tinggal di kota lebih nyaman, lebih sehat, lebih aman, lebih sejahtera, dan lebih mudah. Tujuan besar sebuah kota seperti itu. Ada tiga pilar yang harus disiapkan untuk membangun *smart city*. Pilar pertama adalah kesiapan untuk menjadi sebuah kota pintar. Siap dari sisi alamnya, misalnya kota tersebut punya potensi besar. Kalau tidak punya sumber daya alam, harus dibangun fondasinya, yaitu struktur. Yang dimaksud adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM), aparatur pemerintah, kemampuan APBD, modal, investasi dan lainnya.

Pilar kedua seperti apa?

Infrastruktur fisik, seperti lapangan udara, pelabuhan, jalan apal dan mulus, listrik, air bersih, penanganan sampah, dan sebagainya. Terus kesiapan digitalisasi, yaitu teknologi informasi dan teknologi (IT), dibangun *broadband wifi*. Ini infrastruktur

fisik. Yang lainnya adalah sosial infrastruktur, seperti rumah ibadah, alun-alun, taman terbuka hijau, dan lainnya. Kemudian, pilar ketiga adalah suprastruktur. Ini mencakup peraturan daerah dan pelaksanaannya. Apa pun inovasi daerah, kalau tidak ada kemauan politik (*political will*), tidak akan terjadi. Apa pun yang dilakukan pemerintah daerah, kalau tidak ada *political will* tidak akan terwujud. Seperti, perda dan lainnya. Selain itu adalah kultur masyarakat, siap tidak menjalankan *smart city*. Teknologi keamanan misalnya, untuk *security* apa pakai kartu untuk keluar masuk perumahan. Masyarakat tidak mau tertib dan masih buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Kesiapan masyarkat sangat penting. Tanpa kesiapan masyarakat ini percuma. Itu baru kesiapan menuju kota pintar.

Citiasia baru menyelenggarakan *Smart Indonesia Award*. Bagaimana pengukurannya?

Salah satu yang diukur kesiapan itu. Yang juga diukur *smart governance*, tata kelola birokrasi pintar, pintar yang identik dengan teknologi. Kemudian *smart branding*, yang menyangkut bagaimana memasarkan daerah. Juga menyangkut kebijakan ekonomi, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki lingkungan sosial masyarakat. Dua hal tadi menjadi sisi pengukuran yang dituangkan dalam model tingkat kematangan kota, dilihat dari kesiapan awal, siap, dan *full* siap. Kalau keduanya dipenuhi masuk *maturity* atau kematangan.

Untuk mengukur kesiapan tersebut, bagaimana kita memperoleh dan menganalisa datanya?

Kami menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, daerah dalam angka, data LAKIP, data dari koran, media *online*, dan sebagainya. Semua diukur menjadi parameter. Yang menarik dari data itu, kami menggunakan *big data* analitik, karena sekian teradata, ada data media, kalau tidak mengunakan *big data* ya tidak bisa. Penghargaan yang lain mungkin hanya menggantungkan pada data sekunder atau kuisioner sendiri. Kami memanfaatkan seluruh data yang ada, kemudian kami analisa. Data sekunder ditambah data primer menjadi *big data* analitik. Ini untuk menentukan nilai kesiapan kota. Dari data itu, yang diukur adalah kinerja, inovasi, *engagement* yang dilakukan pemda seluruhnya dan dampaknya. Ujungnya tentang peningkatan kesejahteraan daerah, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan rasio gini, dan lainnya.

Bagaimana hasil pengukuran untuk kesiapan menjadi kota cerdas tersebut?

Ini bicara *maturity*, untuk provinsi, yang paling tinggi Jawa Barat dengan nilai 63 plus dari 100. Yang paling bawah Kalimantan dengan nilai 32. Untuk mencapai indek sempurna, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, terutama infrastruktur untuk kesiapan kota cerdas. Hanya, yang bisa dikontrol SDM, manaje-

men, modal, infrastruktur, perda. Ini jauh dari kesiapan menjadi kota cerdas. Untuk kota cerdas, yang paling tinggi Surabaya kemudian Bandung.

Bagaimana dengan kota-kota lain?

Yang lain masih di bawah. Pekerjaan rumah kita masih sangat besar untuk mewujudkan *smart city*. Itu pun baru tahap membangun *readiness*, kesiapan. Bagaimana dengan Kota Sorong, Batu, Pasuruan, atau kota-kota lain di luar Jawa? Artinya, pekerjaan rumah untuk mewujudkan *smart city* masih banyak.

Pekerjaan rumahnya apa saja?

Kami punya 54 persoalan yang dalam riset kami terkait dengan *smart city*. Mulai dari bagaimana pemerintah menata administrasi barang dan jasa untuk publik, kebijakan, birokrasi, *branding*, dan sebagainya. Banyak sekali kota yang tidak berpikir bahwa *branding* itu penting. Dia ingin maju, namun tidak membangun bagaimana agar kota bisa banyak dikunjungi orang. Banyak kota yang menganggap *branding* tidak penting. Kalau mereka ingin maju, seharusnya berpikir bagaimana agar kota banyak mendapat kunjungan dari orang luar, baik melalui kegiatan wisata, berbisnis, dan lainnya. Semua ini akan menimbulkan transaksi. Daerah berpenduduk sedikit jangan minder. Meskipun kecil, tetapi memiliki potensi wisata besar yang bagus, akan menarik orang luar untuk datang dan melakukan transaksi. Bisa menjadi daerah kaya. Banyak kepala daerah yang tidak berpikir bagaimana menjual daerahnya sebagai tujuan wisata dengan menciptakan lingkungan pariwisata bagus dan nyaman, dengan industri rumah sakit yang bagus, dengan hotel yang menarik, dan industri masyaratakat bisa berkembang. Untuk itu memang harus banyak yang dipersiapkan. Kalau daerah tidak punya cukup dana untuk membangun infrastruktur, ya harus menggandeng investor.

Tren pembangunan smart city akhir-akhir ini sepertinya masih parsial ya?

Yang ada belum terintegrasi. Kebanyakan kepala daerah masih berkutat pada pengembangan aplikasi *e-governance* yang tercerai-berai. Berikutnya membuat *e-planing* dan lain-lain, dan masing-masing SKPD buat sendiri, belum terintegrasi. Ini baru bicara aplikasi. Banyak wali kota yang juga masih berpikir parsial. Kalau dia suka taman, ya bikin taman. Kalau suka IT, ya bikin IT. Padahal, pembangunan *smart city* tak boleh parsial. Minimal harus mencakup enam bidang, mulai dari *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment*. Kalau belum harmonis, ya harus dibuatkan *master plan smart city, blue print*-nya seperti apa.

Dari keenam bidang tersebut, bagaimana memulainya?

Kalau dimulai bersamaan, bisa jadi biayanya terlalu mahal. Maka, bisa dimulai satu per satu. Misalnya, dibuatkan dulu *e-governance* yang terintegrasi. Setelah birokrasi beres, sebelum membangun wisata, misalnya, harus ada investasi, harus ada uangnya dulu, karena harus dikenal dulu melalui smart branding. Tetapi, ini tidak harus berurutan. Intinya harus dibereskan semua. Tinggal yang mana yang akan didulukan. Belum lengkap tidak apa-apa. Mulai dulu dari perbaikan birokrasinya secara terintegrasi. Misalnya, pelayanan publik yang berkaitan dengan perizin, harus selesai seminggu. Ini garansi *public service*.

Bagaimana pemahaman para kepala daerah, misalnya para wali kota, akan pentingnya program *smart city* yang terintegrasi?

Saya sudah ketemu beberapa wali kota. Mereka baru sadar bahwa pembangunan kota harus dimulai dari konsep yang terstruktur. Selama ini, kalau mereka maju dalam pencalonan kepala daerah, hal itu tidak terpikir. Mereka yang penting popular, sering kasih sembako, tidak berpikir membangun kota yang *smart*. Kalau yang sudah punya pemikiran kota cerdas, sudah tahu memulainya dari mana. Intinya, untuk membangun kota itu menjadi *smart city*, kepala daerah berpikir komprehensif. K

Citra Baru Banjarbaru

Sebagai kota yang berusia muda, Banjarbaru terus berbenah dan membangun untuk mengembangkan jati dirinya. Banjarbaru pun dicanangkan sebagai kota empat dimensi.

Ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999, Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan baru berumur 16 tahun. Tak ubahnya anak baru gede, dengan semangat dan gairah yang menggebu-gebu, Banjarbaru terus menggalakkan program pembangunan di berbagai bidang. Arsitektur kota ini dikerjakan oleh arsitek Belanda. Tatanan perkotaannya rapi, jalan-jalan cukup lebar dan asri. Peruntukan tata ruang yang serasi menjadi ciri kota ini.

Sebagai kota yang baru tumbuh, jumlah penduduk Banjarbaru terus bertambah. Banyak peluang yang ditawarkan melalui berbagai program pembangunan dan kegiatan usaha. Sebab, pembangunan dan penataan kota memang terus dilakukan sejak ditetapkan sebagai daerah otonom pada 1999. Sejak itu, di kota ini tumbuh berbagai aktivitas usaha mulai dari jasa, perdagangan, industri, permukiman, dan pendidikan. Itulah yang membuat banyak orang makin tertarik bermukim di Banjarbaru.

Sesungguhnya, Banjarbaru awalnya dipersiapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan. Hal itu karena ibu kota yang lama, Banjarmasin, kerap tergenang air di musim hujan. Banjarbaru diharapkan menggantikan fungsi ibu kota provinsi yang lebih representatif. Itulah kenapa hingga kini terlihat banyak banyak gedung perkantoran Dinas Provinsi Kalimantan berada di Banjarbaru. Selain itu, rencana perpindahan ibu kota provinsi ini juga memicu banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan memiliki rumah tinggal yang kedua di kota ini.

Keberadaan Bandar Udara Syamsudin Noor sebagai pintu masuk Kalimantan juga jadi pendorong kemajuan Kota Banjarbaru. Pembangunan digenjot, lahan-lahan yang ada sudah mulai terpancang berbagai bentuk bangunan. Di jalan-jalan utama berjejer bangunan ruko. Banyak tempat, bangunan, serta benda sebagai ciri khas kota ini yang memiliki nilai sejarah, yang menjadi rekam jejak Kota Banjarbaru, sudah mulai beralih fungsi – berubah atau sebagian hilang tergantikan bangunan baru. Ini benar-benar menghilangkan wujud peninggalan yang bernilai sejarah.

Wilayah Banjarbaru mencakup luas 371,30 km^2 atau setara dengan 37.130 ha, yang terbagi atas lima kecamatan dengan 12 kelurahan. Bila melongok ke belakang, Banjarbaru dulunya merupakan perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah

persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang intan dan supir truk antar kota di daerah Cempaka.

Waktu dicanangkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan , Banjarbaru hanyalah tanah perbukitan di lintasan jalan Banjarmasin-Martapura. Posisinya saat ini Bank BRI Banjarbaru, yang dulunya belum ada permukiman. Hamparan tanahnya ditumbuhi padang ilalang dan pohon-pohon yang masih terkesan angker. Di samping lintasan jalan darat, juga lintasan pencari (pendulang) intan tradisional, posisisnya sekarang di belakanng Universitas Lambung Mangkurat (Unilam) Banjarbaru.

Lokasi strategis itu mengundang minat seorang untuk membuka warung. Pewarung, yang tidak diketahui nama dan asalnya itu, menjual minuman teh dan kopi, wadai (kue) apam (serabi). Wadai apam yang lezat, digemari para sopir truk yang melintas dan pendulang intan. Kabar lezatnya wadai apam kesohor ke mana-mana. Penduduk Martapura dan sekitar menamakan daerah tersebut daerah apam. Tak lama kemudian, mengundang banyak orang untuk membuka kedai di situ, mengikuti jejak pewarung yang sukses. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mendirikan rumah di sekitarnya. Sejak itu, terbentuklah perkampungan penduduk yang populer disebut Gunung Apam. Secara administratif, Gunung Apam termasuk wilayah anak Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura.

Sekitar tahun 1950, Gubernur Kalimantan, Murdjani, terobsesi memindahkan ibu kota Kalimantan ke daerah Gunung Apam. Setahun kemudian, Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon ibu kota Provinsi Kalimantan. Kajian planologi pun dilakukan. Gubernur Murdjani dibantu seorang arsitek Belanda, DAW Van der Pijl, merancang Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi. Tahun 1953, pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru mulai dirancang. Namun, sampai akhir jabatan Gubernur Murdjani, proses pemindahan belum diresmikan. Padahal, pembangunan perkantoran dan rumah pegawai telah dimulai. Targetnya, ibu kota Kalimantan pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur Murjani untuk membedakannya dengan Kota Banjarmasin. Banjarbaru dimaksudkan sebagai sebutan untuk kota baru di Banjar. Namun, nama itu akhirnya melekat, dan hingga kini disebut Banjarbaru.

Salah satu ruang publik di Kota Banjarbaru.

Saat RTA Milono menggantikan Murdjani, usaha pembangunan dilanjutkan. Secara resmi, pada tahun 1954, rencana pemindahan ibu kota provinsi ini diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun, belum sampai pemerintah pusat memberikan persetujuan, Kalimantan dipecah menjadi empat provinsi. Banjarbaru pun gagal menjadi ibu kota provinsi. Namun, perjuangan untuk meningkatkan status Banjarbaru tak pernah berhenti. Pada 1975, Banjarbaru akhirnya ditetapkan sebagai kota administratif, dan baru pada 1999 itetapkan sebagai daerah otonom.

Mimpi menjadikannya sebagai ibu kota provinsi kini mulai tergantikan dengan semangat baru membangun jati diri Banjarbaru. Banjarbaru kini dicanangkan sebagai kota empat dimensi yang mandiri dan terdepan. Artinya, membangun kota melalui empat dimensi yang saling berkaitan untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah.

Dimensi pertama adalah peningkatan kemampuan pemerintah sebagai daerah otonom dengan misi lebih meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi birokrasi. Juga peningkatan pelayanan publik dan peningkatan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari upaya peningkatan kemampuan pemerintah kota. Dimensi kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan melalui program penuntasan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan budaya baca bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga adalah dimensi peningkatan kualitas permukiman yang layak huni, representatif, dan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang, pengembangan sarana prasarana kota, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dimensi keempat adalah peningkatan kemampuan ekonomi melalui jasa, perdagangan dan industri, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata. Selain itu, pengembangan pusat jasa, perdagangan dan industri, kawasan bisnis terpadu dan peningkatan promosi sertat kerja sama lintas daerah khususnya dalam penanaman modal.

Hasilnya mulai terasa. Di bidang ekonomi, misalnya, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhannya meningkat dari 5,99 persen pada 2011 menjadi 6,18 persen pada 2012 dan meningkat lagi 6,27 persen pada 2013. Pertumbuhan signifikan ini didorong perkembangan usaha jasa, perdagangan, dan industri. UMKM dan industri besar juga mengalami peningkatan, dari total 324 industri pada 2009 tumbuh dan berkembang semakin banyak hingga menjadi 847 industri pada tahun 2013. Bahkan, pada 2009 hanya terdapat satu industri berskala besar, pada 2013 sudah ada tujuh industri besar yang beroperasi dan telah memberikan kontribusi cukup besar bagi daerah. K

Jonas Membangun Kota Berbudaya

Sekitar tiga tahun memimpin Kota Kupang, Jonas Salean mengakui belum cukup waktu untuk mewujudkan visinya: Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif, dan nyaman. Namun, fondasi yang ia bangun sudah mengarah pada tujuan.

Itulah yang bisa dirangkum atas perjalanan kepemimpinan Jonas Salean di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah dilantik menjadi wali kota pada 1 Agustus 2012, Jonas Salean bersama wakilnya, Hermanus Man, langsung "kejar tayang" menata pembangunan Kota Kupang. Jonas mencanangkan program pembangunan kota berbudaya, modern, produktif, dan nyaman yang berkelanjutan. Tiga tahun sejak memimpin Kota Kupang, hingga Agustus 2015, sudah banyak yang dilakukannya untuk mengubah wajah kota. Meski, diakui, visi dan misi yang dicanangkan belum bisa terwujud seutuhnya.

Untuk mweujudkan visi dan misinya, ditempuh dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan SDM dan masyarakat kota yang berkualitas, meningkatkan mutu pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jonas Salean menjadi wali kota melalui jalur independen. Ini membuktikan bahwa dia diterima masyarakat Kota Kupang. Setelah beberapa bulan dilantik, Jonas Salean mengikuti pendidikan program *Executive Education* berkaitan dengan transformasi kepemimpinan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Havard Kennedy School (HKS), Amerika Serikat. Usai pendidikan, Jonas menyadari, betapa pentingnya bagi seorang pemimpin kota harus memiliki kemampuan implementasi kepemimpinan strategis. Seorang pemimpin harus memiliki inovasi dan terobosan yang memberikan nilai dan manfaat bagi lingkungan. Manfaat kehadiran pemimpin harus bisa dirasakan masyarakat baik saat ini maupun masa mendatang.

Jonas Salean merupakan sosok yang mudah gaul, tanpa melihat latar belakang seseorang, dan selalu mengandalkan kasih dalam semua kegiatan dan pergaulan. Lulusan Hukum Pidana Universitas Jember tahun 1984 ini memulai karier sebagai pegawai negeri sipil di Provinsi NTT – yang menjabat sebagai staf Kementerian Agama. Kesibukan lainnya adalah mengelola *Victory News*. Kariernya terbilang cemerlang. Pada tahun 2002 sampai 2007, Jonas dipercaya sebagai Sekretaris Daerah. Atas tuntutan karier, mendorong pria ini untuk melanjutkan pendidikan Ekonomi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dari tahun 2007 sampai 2009 dia dipercaya sebagai staf Pelaksana Sekretaris Daerah Kota Kupang.

Di tahun 2009, Jonas menjabat staf Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan di Kota Kupang.

Sebelum mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kupang, Jonas Salean menjadi staf Ahli Gubernur NTT bidang ekonomi sejak Oktober 2010. Kata mutiara favoritnya adalah bekerja dan berdoalah.

Olah raga yang menjadi hobinya adalah biliar, menembak, memancing, main catur, tenis meja. Musik kesukaannya blues, jazz, pop, dan rohani. Dia juga suka membaca berbagai buku, mulai dari Alkitab, Renungan Harian, Khalil Gibran, *How to Win Friends and Influence People* – Dale Carniege.

Jonas Salean memimpin kota Kupang yang didiami masyarakat multietnis dari suku Timor, Rote, Sabu, Flores, sebagian kecil suku Tionghoa dan pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya. Semua menyebut dirinya "Beta orang Kupang".

Untuk memajukan Kota Kupang, tidak ada kata lain bagi Jonas Salean selain harus kreatif membuat inovasi pelayanan publik di kota ini. Inovasi yang dilakukan mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, kematian (uang duka), bantuan pendidikan masyarakat miskin, peningkatan kompetensi guru, perizinan, reformasi birokrasi, dan lainnya. Di bidang kesehatan, misalnya, Jonas menata pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Brigade Kupang Sehat (BKS). Setidaknya sudah ada 10 pukesmas yang ditata ulang untuk memberikan pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah penyakit dan pelayanan kesehatan primer di tempat. Lalu layanan BKS 24 jam dilengkapi dengan tenaga medis yang lengkap, diarahkan untuk pelayanan kesehatan jemput bola, yang langsung bisa memberikan tindakan kesehatan dan pengobatan. Ini untuk mempercepat akses layanan kesehatan, bantuan gawat darurat.

Program inovatif pemerintah terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota termasuk perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase, sanitasi, dan lampu penerangan jalan. Sementara program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah pengguliran dana hibah pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp 500 juta per kelurahan.

Bukan hanya itu, Pemko Kupang juga memberi santunan Uang Duka dan Akta Kematian gratis bagi mereka yang kurang mampu. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peristiwa duka juga memberi dampak dalam perekonomian mereka. Pada tiga tahun terakhir, Pemko Kupang telah mengalokasikan Rp 6,75 miliar dan mendapat respons yang baik dan membantu keluarga yang baru kehilangan sanak saudara.

Inovasi bidang ekonomi adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan langsung ke tingkat kelurahan. Pemberdayaan ini untuk meningkatkan dan memperbaiki struktur ekonomi, melalui penguatan modal usaha ekonomi produktif berskala kecil. Tahun 2013 hingga 2015, dana bergulir tanpa bunga yang disalurkan mencapai Rp 25 miliar, yang disebar kepada 51 kelurahan di Kota Kupang. "Inilah dana pemberdayaan terbesar dalam sejarah Kota Kupang," terangnya.

Di tahun 2013, dana pemberdayaan ini mencapai 98 persen dengan tingkat pengembalian 93 persen. Dari tahun ke tahun, dana pemberdayaan ini mengalami kenaikan tiga kali lipat, yang sampai saat ini mampu memberikan 7.388 orang yang memanfaatkan. Pemerintah Kota Kupang juga terus melakukan pembenahan dan pendampingan atas pengelolaan dana pemberdayaan ini.

Untuk masyarakat kurang mampu, juga memberikan bantuan raskin. Setidaknya ada 14.242 rumah tangga miskin yang dianggarkan Rp 6 miliar untuk mengatasi kesulitan pangan. Tidak hanya itu, masyarakat tidak mampu diberikan sekolah gratis. Ini untuk peningkatan SDM sebagai investasi masa depan. Tak kurang, Rp 2,5 miliar tiap tahun digelontorkan untuk 1000 siswa kurang mampu selama 4 tahun. Setidaknya, 15 persen masyarakat kurang mampu di Kota Kupang di tahun mendatang bisa berubah nasibnya menjadi lebih baik.

Wali Kota ini juga kerap blusukan ke setiap kelurahan serta bisa berkantor di sana untuk beberapa hari. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk merasakan denyut pembangunan dan menjaring aspirasi di tengah masyarakat, bagaimana mengetahui langsung aspirasi masyarakat dan menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di tingkat kelurahan. "Ini memudahkan saya membangun dari pinggiran dan menyerap aspirasi masyarakat," jelas Jonas Salean. K

Setelah Pilkada Serentak...

Untuk kali pertama, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak usai digelar pada 9 Desember 2015. Diharapkan muncul pemimpin-pemimpin masa depan dari daerah.

Hasil pilkada di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, tergolong fenomenal. M Syahrial akan tercatat sebagai calon wali kota paling muda yang mampu mengalahkan petahana atau *incumbent*, melalui jalur independen pula. Sangat mungkin, ia juga akan tercatat sebagai wali kota termuda di Indonesia.

M Syahrial kini masih berusia 27 tahun. Sebelum mencalonkan diri, kader muda Partai Golkar ini tercatat sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Saat pencalonan, Partai Golkar memilih mencalonkan pasangan Rolel Harahap-Romay Noor. Rolel adalah Wakil Wali Kota Tanjung Balai. Karena tak memperoleh izin dari partai, M Syahrial menempuh jalur perseorangan dan berpasangan dengan Ismail Marpaung.

Berdasarkan situs *kpu.go.id*, Kamis (10/12), rekapitulasi data C1 sudah mencapai 99,72 persen menunjukkan, pasangan M Syahrial-Ismail Marpaung memperoleh 35.018 suara atau 47,34 persen dari 73.907 suara sah. Mereka jauh mengungguli tiga pasangan lain, yaitu yaitu Rolel Harahap-Romay Noor (20,80%), Milvan Hadi-Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali (18,22%), dan Hamlet Sinambela-Surya Darma AR (13,64%).

Kemenangan Syahrial yang mengejutkan ini menjadi salah satu gambaran hasil pilkada serentak yang untuk tahap pertama digelar pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak digelar di 269 daerah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Secara umum, penyelenggaraan pilkada serentak berjalan dengan baik. Hanya di lima daerah yang pilkadanya terpaksa ditunda, yaitu Pilkada Provinsi Kalimantan

Tengah, Kabupaten Fakfak (Papua), Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara), dan Kota Manado di Sulawesi Utara. Sesuai dengan ketentuan, penundaan dilakukan paling lama 14 hari. Dengan demikian, proses penghitungan dan penetapan hasilnya tetap bisa dilakukan secara serentak.

Wali Kota Denpasar Ray Dharmawijaya Mantra.

Fenomena Golput

Meskipun berjalan lancar, ada sejumlah catatan yang diberikan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini. Pertama adalah kecenderungan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Hal ini terlihat dari angka golput di berbagai daerah yang tergolong sangat tinggi, lebih tinggi dari pilkada-pilkada sebelumnya. Bahkan, di banyak daerah diplesetkan pemenangnya adalah golput, termasuk di daerah yang pilkadanya hanya diikuti calon tunggal. Angka golput di berbagai daerah berkisar 50-70 persen dari jumlah pemilih.

Sebagai contoh, di Kota Medan, Sumatera Utara, jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya mencapai 75,8 persen. Artinya, warga Kota Medan yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya 24,02 persen. Padahal, KPU Pusat menargetkan tingkat partisipasi pemilih di tiap daerah 77,5 persen. Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Randiman Tarigan pun mengaku prihatin. "Segala upaya sudah dilakukan. Kami tak yakin apabila informasi pilkada tidak sampai ke masyarakat," katanya.

Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), partisipasi pemilih hanya 47 persen. Artinya, angka golput di Samarinda lebih besar daripada pemilih yang datang memilih di TPS, yakni 53 persen. Pada pilkada 2010, angka golput di Kota Samarinda hanya 40 persen. Sementara itu, di Kota Batam, Kepulauan Riau, tim riset LSI bekerja sama dengan Jaringan Info Publik mencatat partisipasi pemilih hanya 50,24 persen, atau hampir sama dengan angka golput, yang mencapai 49,7 persen. Demikian juga di Kota Surabaya, Jawa Timur, angka golputnya hampir 50 persen. Di Kota Denpasar, Bali, KPU setempat menegaskan bahwa angka golput mencapai 42,35 persen.

M Syahrial-Ismail Marpaung, pemenang Pilkada Kota Tanjung Balai

Tak hanya di kota-kota, kecenderungan angka golput yang semakin tinggi juga terjadi di berbagai kabupaten. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai angka 511.436 pemilih atau hampir 50 persen. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdasar data KPU setempat, angka golput mencapai 40 persen. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, KPU Kabupaten Malang bahkan mengaku telah gagal menekan angka golput karena berdasarkan hasil *scan* dan *input* data formulir C1, jumlah pemilih yang menggunakan haknya hanya 58,38 persen. Artinya, jumlah itu hampir sama dengan pemilih yang tidak datang ke TPS. Pada pilkada 2010, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Malang masih mencapai 60 persen.

Fenomena golput yang semakin tinggi dalam pilkada serentak 2015 dirasakan berbagai kalangan cukup mengkhawatirkan. Sebab, tingkat partisipasi publik yang rendah akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Jika kualitas demokrasi rendah, pilkada tak bisa diharapkan mampu melahirkan calon-calon pemimpin nasional di masa depan yang muncul dari daerah. Bahkan, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf secara khusus menyoroti tingginya angka golput di wilayahnya.

"Iya, angka golputnya memang tinggi,

dan kami harap ada solusi pada tahun-tahun yang akan datang oleh pemerintah," ungkap Gus Ipul, panggilannya, kepada wartawan. Menurutnya, tingginya angka golput dikarenakan sosialisasi dari masing-masing pasangan calon dibatasi oleh KPU, sehingga banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang tahu siapa kandidat dalam pilkada. "Mungkin di antaranya pembatasan kampanye oleh KPU yang membuat angka golput semakin meningkat," imbuh Gus Ipul. Disarankan Gus Ipul, KPU harus mencari terobosan agar dalam pilkada serentak tahap berikutnya tingkat partisipasi pemilik semakin tinggi.

Hal yang sama diungkapkan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, calon *incumbent* yang kembali meraih suara terbanyak dalam pilkada Kota Denpasar. Menurutnya, angka partisipasi di Denpasar dalam pilkada ini memang tegolong rendah, sehingga angka golputnya tinggi. "Salah satunya, ini dikarenakan sosialisasi dari penyelenggara lemah," ujar Dharmawijaya yang meraih suara 82,19 persen. Hal itu, menurutnya, harus jadi pelajaran bagi KPU sebagai penyelenggara.

Dzulmi Edin-Akhyar N, pemenang Pilkada Kota Medan

Hasil Pilkada Kota

Selain angka golput yang tinggi, pilkada serentak 2015 ini diwarnai adanya kecenderungan calon petahana (*incumbent*) menjadi pemenang. Bahkan tingkat kemenangan petahana disebut-sebut mencapai 70 persen. Berdasarkan riset Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dari 538 calon kepala dan calon wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak 2015 ini, 278 orang atau lebih dari separo di antara mereka merupakan calon petahana. Mereka adalah mantan gubernur, bupati, dan wali kota ataupun wakilnya.

Berdasarkan riset LSI yang melakukan penghitungan cepat atau *quick count* di 21 wilayah, sekitar 70 persen pemenang pilkada adalah calon *incumbent*. Fenomena ini merata, baik untuk pilkada provinsi maupun kabupaten/kota. "Mengapa *incumbet* menang, karena selama memimpin mereka dipersepsikan berhasil, puas, dan sudah popular," kata peneliti LSI Ardian Sofa saat memberikan keterangan pers di Kantor LSI, Jakarta, sehari setelah pilkada serentak dilangsungkan. Selain itu, *incumbet* juga dianggap menguasai dan memampu menjangkau semua segmen pemilih.

Sebagai contoh, dari 21 wilayah yang diriset LSI, pilkada di 15 daerah dimenangkan oleh petahana atau keluarga *incumbent*. Salah satunya pilkada Provinsi Sumatera Barat yang dimenangkan calon petahana, pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit, dengan raihan suara 59,04 persen. Contoh lain, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pasangan calon petahana Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyamoko memperoleh 88,78 persen suara. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, calon petahana Rita Widyasari-Edi Damansyah meraih 88,76 persen suara.

Dalam pilkada yang diselenggarakan di 36 kota pun, banyak petahana yang keluar sebagai pemenang. Berdasarkan hitung cepat dan rekapitulasi sementara, sedikitnya 20 pasangan calon wali kota-wakil wali kota *incumbent* memimpin perolehan suara. Ini belum termasuk pilkada di Kota Manado dan Pematangsiantar yang masih ditunda, yang masing-masing ada calon *incumbent*. Artinya, lebih dari separo pasangan wali kota-wakil wali kota *incumbent* keluar sebagai pemenang. Bahkan, beberapa di antaranya meraih kemenangan telak. Sebagai contoh, pasangan Samanhudi-Santoso menak telak di Kota Blitar dengan raihan suara tertinggi, 92,04 persen. Di susul kemudian, di Bandar Lampung pasangan *incumbent* Herman HN-Yusuf Kohar meraih 86,66 persen, di Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu S meraih 86,22 persen, di Denpasar Dharmawijaya-Jaya Negara meraih 82,19

Calon Incumbent dengan Kemenangan Telak

Kota	Calon	Raihan Suara
Blitar	Samanhudi-Santoso	92,04%
Bandar Lampung	Herman HN-Yusuf Kohar	86,66
Surabaya	Tri Rismaharini-Whisnu S	86,22
Denpasar	Dharmawijaya-Jaya Negara	82,19
Medan	Dzulmi Edin-Akhyar N	71,68

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

persen, dan di Medan Dzulmi Edin-Akhyar N meraih 71,68 persen.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa peluang petahana untuk memangi kembali pilkada sangat terbuka lebar. Namun begitu, pilkada serentak di 36 kota ini tetap memunculkan wajah-wajah baru, bahkan ada yang datang dari jalur independen. Kemenangan M Syahrial di Kota Tanjung Balai dan Neni Moerniaeni di Kota Bontang adalah di antara contohnya. Semoga kombinasi "wajah lama" dan "wajah baru" dalam kepemimpinan kota hasil pilkada serentak 2015 ini bisa mempercepat pembangunan dan kemajuan kota-kota di Indonesia.

Hasil Pilkada Serentak 2015 di 36 Kota

Kota	Provinsi	Pemenang
Binjai	Sumatera Utara	Muhammad Idaham-Timbas*
Gunung Sitoli	Sumatera Utara	Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli
Medan	Sumatera Utara	T Dzulmi Eldin-khyar Nasution*
Pematangsiantar	Sumatera Utara	(tunda)
Sibolga	Sumatera Utara	M Syarfi Hutauruk-Edipolo Sitanggang*
Tanjung Balai	Sumatera Utara	M Syahrial-Ismail Marpaung
Bukittinggi	Sumatera Barat	M Ramlan Nurmatias-Irwandi
Solok	Sumatera Barat	Zul Elfian-Reinier Intan Batuah
Dumai	Riau	Zulkifli AS-Eko Suharjo
Sungai Penuh	Jambi	Asafri Jaya Bakri-Zulhelmi*
Bandar Lampung	Lampung	Herman HN-Muhammad Yusuf Koha*
Metro	Lampung	A Pairin-H Djohan
Batam	Kepulauan Riau	Muhammad Rudi-Amsakar Ahmad
Depok	Jawa Barat	Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna
Magelang	Jawa Tengah	Sigit Widyonindito dan Windarti Agustina*
Pekalongan	Jawa Tengah	Arslan Djunaid dan HM Saelany Machfudz*
Semarang	Jawa Tengah	Hendrar Prihadi dan Hj Hevearita GR*
Surakarta	Jawa Tengah	FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo*
Blitar	Jawa Timur	Muh Samanhudi Anwar dan Santoso*
Pasuruan	Jawa Timur	Setiyono dan Raharto Teno Prasetyo
Surabaya	Jawa Timur	Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana*
Cilegon	Banten	Tb Iman Ariyadi dan Edi Ariadi*
Tangerang Selatan	Banten	Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie*
Denpasar	Bali	IB Rai Dharmawijaya-IGN Jaya Negara*
Mataram	NTB	Ahyar Abduh-Mohan Roliskana*
Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan
Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Ibnu Sina-Hermansyah
Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	M Rizal Effendi-Rahmad Mas'ud*
Bontang	Kalimantan Timur	Neni Moerniaeni-Basri Rase
Samarinda	Kalimantan Timur	Syaharie Ja'ang-Nusyirwan Ismail*
Bitung	Sulawesi Utara	Max Jonas Lomban-Maurits Mantiri*
Manado	Sulawesi Utara	(tunda)
Tomohon	Sulawesi Utara	Jimmy Feidie Eman-Syerly Adelyn Sompotan*
Palu	Sulawesi Tengah	Hidayat-Sigit Purnomo (Pasha Ungu)
Ternate	Maluku Utara	Burhan Abdurahman-Abdullah Tahir*
Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Ali Ibrahim-Muhammad Senin

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
Catatan: * Calon incumbent.

Perjuangan Para Srikandi

Sedikitnya ada lima perempuan yang memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 36 kota pada 9 Desember 2015. Dua merupakan petahana, dan tiga lainnya pendatang baru. Siapa mereka? Bagaimana perjuangan mereka?

Tri Rismaharini bersama para pendukungnya.

Pilkada di Kota Bontang, Kalimantan Timur, nyaris hanya diikuti satu pasangan calon jika Neni Moerniaeni tidak nekad maju melalui jalur independen. Seperti kasus di Kota Surabaya, pilkada Kota Bontang juga nyaris ditunda andai Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Pilkada sehingga pilkada tetap bisa digelar meski hanya ada calon tunggal.

Ketika masa pendaftaran menjelang berakhir, di Kota Bontang hanya ada satu pasang calon yang didaftarkan oleh gabungan banyak partai politik (parpol), yaitu Adi Darma-Isro Umarghani, yang merupakan calon petahana (*incumbent*). Tak ada satu pun parpol yang melirik calon lain. Di saat krusial itulah, Neni yang ketika itu tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, nekad mendaftarkan diri melalui jalur independen. Langkah ini ia tempuh lantaran tidak ada lampu hijau dari partainya.

Bayangkan, calon independen ini harus berjuang melawan calon *incumbent* yang didukung oleh semua kekuatan parpol. Namun, akhirnya justru Neni yang berpasangan dengan Basri Rase inilah yang keluar sebagai pemenang, menumbangkan calon petahana. Berdasarkan rekapitulasi formulir C-1 yang sudah mencapai 100 persen, pasangan Neni- Basri Rase berhasil mengumpulkan dukungan 44.301 suara atau 55,85 persen suara pemilih. Sedangkan, pasangan Adi Darma-Isro Umarghani meraih 35.018 suara atau 44,15 persen.

Kepada media setempat, Neni menggambarkan perjuangannya untuk meraih kemenangan penuh suka duka. Dokter spesialis kandungan ini mengaku, untuk mengaja optimisme dan semangat, ia banyak berdoa dan bermunajat kepada Tuhan.

“Alhamdulillah, sangat luar biasa buat saya. Ini adalah kemenangan rakyat Bontang. Karena, dari awal kami mencalonkan karena diusung oleh rakyat, kekuatan rakyat sangat luar biasa. Dorongan rakyat begitu kuat, inilah pada akhirnya, kami memenangkan pemilu di Bontang,” ujarnya.

Pilkada di Kota Semarang, Jawa Tengah, juga dimenangi perempuan dengan posisi sebagai wakil wali kota. Dia adalah Hevearita Gunaryanti, yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Pasangan ini memperoleh 47,05 persen, mengalahkan pasangan Soemarmo-Zuber Safawi (31,30%) dan Sigit Ibnugroho-Agus Sutyoso (21,65%). Berbeda dengan Hevearita, Hendrar Prihadi adalah calon *incumbent*.

Meskipun berpasangan dengan petahana, perjuangan Ita, panggilan Hevearita Gunaryanti, untuk memenangi pilkada tak mudah. Berkali-kali ia diterpu isu kasus korupsi. Tapi ia akhirnya mampu meyakinkan pemilih dan memenangkan pertarungan. Ia merupakan sarjana pertanian lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran. Saat mengikuti pilkada, statusnya masih tercatat sebagai Direktur Utama PT Sarana Patra Hulu Cepu, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jateng, yang dijabat sejak 2006. Meskipun sarjana pertanian, Ita justru lama bekerja di lembaga-lembaga keuangan dan perbankan.

Salah satu program andalan Ita ketika nanti resmi menjadi wakil wali kota adalah merevitalisasi industri wisata Kota Semarang. Sebagai kota besar yang memiliki sejarah panjang, menurut Ita, sudah saatnya industri pariwisatanya direvitalisasi agar

Neni Moerniaeni

Hevearita Gunaryanti

Windarti Agustina

bisa bersaing dengan kota-kota lain.

Di Kota Magelang, Jawa Tengah, calon wakil wali kota Windarti Agustina yang berpasangan dengan Sigit Widyonindito, yang merupakan calon wali kota *incumbent*. Pasangan ini memperoleh suara 48,61 persen, mengalahkan perolehan pasangan Joko Prasetyo-Priyo Waspodo (32,74%) dan Moch Haryanto-Agus Susatyo (18,64%).

Sebelum menjadi calon wakil wali kota, Windarti yang kelahiran Magelang, 27 Agustus 1967, ini tercatat sebagai Anggota/Ketua Fraksi DPRD Kota Magelang 2014-2019. Sarjana Bahasa Inggris dari Universitas Tidar Magelang ini memang seorang politisi dari PDI Perjuangan. Salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan Windarti adalah menjadikan Kota Magelang sebagai kota pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan profesional.

Masih ada dua perempuan yang cukup popular yang menjadi pemenang dalam pilkada 2015 ini. Keduanya adalah calon *incumbent*. Yang pertama adalah Tri Rismaharini, yang kembali memenangi pilkada Kota Surabaya. Sedangkan, yang kedua adalah Airin Rachmi Diany, yang untuk kedua kalinya memenangi pilkada Kota Tangerang Selatan.

Pilkada Kota Surabaya juga nyaris batal lantaran Risma tak ada lawan. Proses menuju pilkada di Surabaya ini paling mendebarkan. Akhirnya muncul lawan tanding, pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari. Selama ini Risma diakui sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia. Bahkan, prestasi dan kinerjanya

Airin Rachmi Diany

pun diakui lembaga-lembaga dunia. Risma juga pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia. Dengan prestasi dan kinerja yang terbilang fenomenal, Risma memiliki modal yang sangat besar sebagai calon *incumbent*. Hasil pilkada membuktikannya. Kemenangan pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana terbilang telak, 86,22 persen.

Bagi Risma, kemenangan yang kedua kalinya ini merupakan amanah dari rakyat. Karena itu, ia bertekad untuk membangun Kota Surabaya dengan lebih baik lagi. "Ini semua demi Surabaya yang lebih baik," kata Risma menyambut kemenangannya. Risma juga berjanji akan segera menyiapkan warga Surabaya menghadapi era pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016. "Kami akan semaksimal mungkin berupaya agar Surabaya bisa sejajar dengan kota lain di ASEAN. Lima tahun ke depan jauh lebih berat dari pada lima tahun sebelumnya," tandas Risma.

Sementara itu, meskipun *incumbent*, perjuangan Airin Rachmi Diany yang berpasangan dengan Benyamin Davnie untuk memenangi pilkada di Kota Tangerang Selatan tidaklah ringan. Ia selalu dibayang-bayangi kasus korupsi yang menjerat keluarga besarnya, yaitu mertuanya yang mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan suaminya, Tubagus Chaeri Wardhana.

Tapi, berkat perjuangan dan kerja kerasnya, Airin mampu meraih kepercayaan rakyat Tangerang Selatan. Ia mampu mengalahkan dua penantangnya dalam raihan suara, yaitu Ikhsan Modjo-Li Claudia dan Arsid-Elvier Ariadiannie. Pasangan Airin-Benyamin meraup 60,46 persen suara, sedangkan Arsid-Elvier 31,77 persen dan Ikhsan Modjo-Li Claudia 7,78 persen.

Bagi Airin, kemenangannya merupakan bentuk kepercayaan masyarakat selama dia memimpin Kota Tangerang Selatan selama ini. Ia mengakui, dalam lima tahun ke depan, tantangannya lebih berat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ia bertekad akan membangun kotanya dengan lebih baik lagi.

Merekalah srikandi-srikandi yang telah berjuang memperoleh kemenangan dalam pilkada serentak 2015 di 36 kota. Saatnya menunggu kiprah mereka membangun dan memajukan kota yang mereka pimpin dalam lima tahun ke depan. K

Penghargaan Taat Pajak Kota Medan

SEBAGAI bentuk apresiasi, Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan *reward* atau penghargaan kepada para wajib pajak yang patuh membayar pajak. Bertempat di Ball Room Gedung Selecta Medan, Sumatera Utara, 4Desember 2015, Pejabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan memberikan *reward* kepada 70 wajib pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Dalam kesempatan tersebut, Randiman Tarigan menegaskan, kepatuhan membayar pajak daerah akan mendorong percepatan pembangunan di Kota Medan. Seluruh pajak yang dibayarkan itu juga digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kota Medan. Karena itu, ia berharap penghargaan ini juga memotivasi para wajib pajak semakin taat membayar pajak dan menumbuhkan budaya malu bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu.

Dari 70 wajib pajak yang mendapat *reward*, Dinas Pendapatan Kota Medan selaku penyelenggara kegiatan menetapkan tiga pelaku usaha terbesar dalam membayar pajak tahun 2015. Untuk kategori hotel, JW Marriot Jalan Putri Hijau tercatat sebagai wajib pajak yang terbesar dalam membayar pajak, yakni Rp 909.421.827 per bulan. Untuk kategori restoran, Mc Donlad Merdeka Walk Jalan Balai Kota tercatat sebagai pembayar pajak restoran terbesar senilai Rp 201.695.6956 per bulan. Adapun, untuk kategori hiburan, Bioskop 21 Centre Point merupakan tempat hiburan terbesar membayar pajak senilai Rp 301.485.639 per bulan.

"Semoga penghargaan ini memberikan tambahan energi bagi saudara-saudara wajib pajak sekalian agar terus berkontribusi kepada pembangunan kota, sekaligus sebagai spirit bagi masyarakat untuk semakin taat pajak," ujar Randiman Tarigan.

Pada 2015, target penerimaan pajak daerah Kota Medan sebesar Rp 1,1 triliun. Dari jumlah itu, target penerimaan dari sektor pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan sekitar Rp 245 miliar atau 22,27 persen dari total target penerimaan pajak daerah Kota Medan. Diakui Randiman, pajak daerah dari sektor ini menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan di Kota Medan.

Mengoptimalkan pencapaian target pajak daerah bilang Randiman, tentunya membutuhkan komunikasi yang baik dan akrab, serta lebih bervariasi guna lebih meningkatkan sikap sukarela untuk membayar pajak dari masyarakat. Karena itu, Randiman memberikan apresiasi penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada para pembayar pajak terbaik. "Kita tahu, masyarakat kita memiliki budaya paternalistik. Jadi, faktor-faktor keteladanan cukup penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kota dengan cara taat membayar pajak," ungkapnya.

Bagi Randiman, kegiatan pemberian penghargaan seperti ini sekaligus juga dapat dijadikan sebagai wahana edukasi, sosialisasi, dan publikasi di bidang perpajakan dan industri pariwisata yang salah satu tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

Acara pemberian *reward* ini dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan Kota Medan M Husni, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara Deni S Wardana, para pejabat di lingkungan Pemko Medan, pimpinan asosiasi profesi/usaha, pelaku industri kepariwisataan, serta para wajib pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. K Humas Pemko Medan

Pemko Magelang Launching PATEN

PEMERINTAH Kota (Pemko) Magelang, Jawa Tengah, terus mencari berbagai terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya di bidang perizinan. Untuk itu, Pemko Magelang melakukan *launching* Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan yang disingkat PATEN. PATEN ini merupakan pelimpahan sebagian kewenangan wali kota yang diserahkan kepada camat. Dengan layanan ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan.

Launching PATEN dilakukan Pelaksana Tugas Wali Kota Magelang Rudy Apriyantono, di sela upacara peringatan HUT ke-44 KORPRI dikaitkan dengan HUT ke-70 PGRI dan Hari Guru Nasional tingkat Kota Magelang, bertempat di halaman depan Kantor Wali Kota, akhir November 2015. *Launching* ditandai dengan penyerahan spanduk bertuliskan "Selamat Datang di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan" kepada tiga camat di Kota Magelang.

"Para camat saya minta segera melakukan segala persiapan, baik administrai, koodinasi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. PATEN ini harus dilaksanakan efektif dan efisien, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat," kata Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengungkapkan rasa bangganya kadapa KORPRI karena organisasi ini terus berusaha menguatkan eksistensinya serta meningkatkan kompetensi dan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Menurutnya, baik buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para anggota KORPRI. Masyarakat saat ini sangat berharap terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Sebagai insan aparatur negara dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Ini

butuh kesungguhan para abdi negara agar membuahkan hasil dan manfaat," ujarnya. Salah satu cara untuk peningkatan kinerja, menurutnya, adalah melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Karena itu, aparat pemerintah wajib melaksanakan reformasi birokrasi tanpa basa-basi dengan mencari terobosan baru. "Birokrasi yang efektif dan efisien adalah birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Maka, kita semua dituntut memberikan pelayanan publik yang berkualitas," tandasnya. K Humas Pemko Magelang

New Zealand.

Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosialinda menyambut baik kunjungan tim tersebut. "Diharapkan, pada tahun 2016 pemasangan konstruksi anti-gempa pada rumah sakit dan kantor wali kota segera terwujud," ujar Patriana. Patriana juga memerintahkan Kepala BPBD Kota Bengkulu untuk segera menindaklanjuti kerja sama ini. "Kepada BPBD, silakan ditindaklanjuti hasil dari pertemuan ini, agar dapat terealisasi di tahun depan," pungkas Patriana. K Humas Pemko Bengkulu

Bantuan Kegempaan Selandia Baru untuk Bengkulu

PEMERINTAH Kota (Pemko) Bengkulu akan memperoleh bantuan pemasangan konstruksi anti-gempa fasilitas pelayanan publik senilai Rp 10 miliar dari GNS Science New Zealand. Hal itu terungkap saat Pemko Bengkulu menerima kunjungan kerja Tim Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana pada akhir November 2015. Tim tersebut diketuai oleh Faisal Fadhani dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ikut serta dalam kunjungan adalah Phil Massey dari GNS Science New Zealand dan Geaoff Kelgouv.

Kedatangan Tim Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Patriana Sosialinda yang didampingi Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu.

"Tujuan kedatangan kami untuk mohon dukungan, menjalin kerja sama, dan membantu pemerintah daerah dalam upaya antisipasi risiko bencana. Yaitu, meningkatkan penanggulangan bencana sejak dini, memperkenalkan kegiatan penangulangan melalui seminar-seminar dan pelatihan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang aktif dan sigap bencana," ujar Faisal.

Pada kunjungan tersebut, diungkapkan bahwa Selandia Baru dan Jepang siap mengucurkan dana bantuan pembangunan konstruksi tahan gempa untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik, seperti Rumah Sakit Kota Bengkulu. "Besaran dana bantuan pembangunan fasilitas pelayanan publik tersebut sebesar Rp 10 miliar yang masing-masing berasal dari Selandia Baru sebesar 20 persen dan Jepang 80 Persen," ujar Phil Massey dari GNS Science

Promo Investasi Semarang Raih Rp 6,5 Triliun

AGENDA tahunan promosi investasi Kota Semarang, Jawa Tengah, yang disebut Semarang Bisnis (Sembis) Forum, mendulang sukses. Sembis 2015 yang digelar pada awal Desember 2015 di Ruang Loka Krida, Gedung Moch Ihsan, Semarang, diikuti tak kurang dari 200 investor, pelaku usaha swasta, asosiasi usaha dari BUMD dan BUMN, dan lembaga keuangan dari kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Dalam forum ini pula ditandatangani persetujuan (*letter of intent*/LoI) investasi senilai Rp 6,5 triliun.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang Sri Martini, dalam laporan yang dibacakannya, menyampaikan, penyelenggaraan Sembis Forum tahun ini merupakan tahun kesembilan. Adapun, tema Sembis 2015 ini adalah "Peran PTSP dalam Mendukung Peningkatan Investasi Daerah".

Sri Martini bercerita, sejak tahun pertama, pelaksanaan Sembis telah banyak kesepakatan investasi yang dicapai dengan pihak swasta/investor berupa LoI. Tahun-tahun berikutnya, banyak LoI yang telah terealisasi dan sebagian masih dalam tahap proses perizinan. "Hingga triwulan III tahun 2015 ini, realisasi investasi Kota Semarang mencapai Rp 7,027 triliun. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2014 lalu," papar Sri Martini.

Sejumlah peluang investasi ditawarkan dalam Sembis 2015 ini, di antaranya investasi pembangunan KPS SPAM Semarang Barat, kawasan industri Wijaya Kusuma, pengembangan Hutan Tinjomoyo, pengembangan bagian Wilayah Kota (BWK) 2 Kecamatan Pedurungan, pengembangan agrowisata Gunungpati dan Mijen, pembangunan gedung parkir Pandanaran, dan pengembangan kawasan BSB.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang, dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli bidang hukum dan politik, Musthohar, mengatakan, Sembis memiliki tujuan strategis sebagai sarana promosi potensi dan peluang investasi daerah yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, lanjutnya, forum bisnis ini juga merupakan media untuk mempertemukan para investor dengan pemilik proyek investasi guna memberi peluang kerja sama investasi yang saling menguntungkan.

Dia juga menegaskan, penyelenggaraan Sembis yang kesembilan ini diharapkan menjadi momentum yang tepat dan strategis guna meningkatkan kualitas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

sebagai salah satu faktor dalam mendukung peningkatan potensi dan investasi daerah.

"Berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan Sembis sebelumnya, saya optimis bahwa Sembis kali ini bisa lebih baik, lebih greget di semua segi, utamanya dalam membuka kran investasi sebesar-besarnya di Kota Semarang," ungkap Musthohar.

Di samping itu, lanjutnya, yang terpenting adalah transaksi investasi tahun ini akan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang muaranya mampu memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang, lanjutnya, siap memberikan pelayanan terbaik terkait dengan kebutuhan calon investor yang akan menanamkan investasinya di Kota Semarang.

Sebagai rangkaian dari kegiatan Sembis 2015 ini digelar pula seminar dengan topik "Potensi dan Peluang Investasi Kota Semarang" , "Kesiapan PTSP dalam Mensikapi Kebijakan Perizinan Investasi Instan", dan "Peran Kawasan Industri dalam Pengembangan Investasi di Kota Semarang".

Hingga penyelenggaraan Sembis 2015 berakhir, tercatat adanya penandatanganan LoI dengan nilai investasi sebesar Rp 6,565 triliun. Di antaranya, LoI ditandatangani dengan bidang usaha kesehatan, elektronik, apartemen, kawasan *mix use* komersial dan perumahan, dan kawasan industri. Tak hanya untuk Kota Semarang, dalam Sembis 2015 ini, seperti biasa, juga ditawarkan sejumlah investasi dari Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. K Humas Pemko Semarang

Di Bontang, Pelayanan RT Berbasis Elektronik

PERBAIKAN dan peningkatan kualitas pelayanan di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dilakukan hingga ke tingkat rukun tangga (RT). Dengan berbagai inovasi, kini pelayanan di tingkat RT di Kota Bontang sudah berbasis elektronik. Awal Desember 2015, misalnya, Wali Kota Bontang Adi Darma meresmikan pengoperasi Integrasi Pelayanan RT dan Pelayanan Kelurahan Berbasis Aplikasi Elektronik (e-RT) di Kelurahan Gunung Telihan. Saat peresmian, Adi Darma didampingi Lurah Gunung Telihan Gunung Telihan, Viki Rizky Riyadis.

Turut hadir pada pelaksanaan *launching* ini adalah Kepala Bappeda Kota Bontang Zulkifli, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kistari, camat dan lurah se-Kota Bontang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 30 ketua RT di kelurahan setempat. Kehadiran Wali Kota Bontang pada *launching* aplikasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan moril Pemerintah Kota Bontang terhadap inovasi layanan yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Telihan. Kini, semua layanan di Kelurahan Gunung Telihan telah berbasis aplikasi layanan elektronik.

Dijelaskan Adi Darma, aplikasi ini mempermudah masyarakat, ketua RT, dan kelurahan dalam hal pelayanan. Selain itu, akurasi data layanan terjamin dan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam melakukan pelayanan. Tidak hanya efisien dalam waktu, tetapi pelayanan juga efektif.

Guna mensukseskan integrasi pelayanan RT dan kelurahan berbasis aplikasi elektronik, masing-masing ketua RT di Kelurahan Gunung Telihan diberikan sebuah laptop melalui dana Prolita. Tentu, hal ini merupakan sebuah usaha mewujudkan Bontang sebagai *smart city*. Pada sosialiasi ini, seluruh ketua RT diberikan materi berupa *overview* mengenai pelayanan terpadu kelurahan dan kecamatan di Kota Bontang. Selain itu juga dijelaskan tentang mekanisme, fitur, serta manfaat integrasi layanan RT dan kelurahan.

"Masyarakat Kota Bontang diharapkan bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan kepentingannya," ujarnya. Adi Darma juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi yang dilakukan oleh Kelurahan Gunung Telihan. Adi menuturkan, peran RT sangat penting di masyarakat untuk membantu tugas pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Oleh karena itu, partisipasi aktif ketua RT sangat dibutuhkan sehingga aplikasi ini bisa segera dioperasikan.

"Keberadaan aplikasi layanan terpadu RT dan kelurahan berbasis elektronik ini memberi nilai tambah pada program 1 laptop untuk 1 RT. Masyarakat menjadi mudah untuk mengurus segala sesuatu tanpa harus antre. Dan inovasi ini perlu diterapkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang. Pemerintah berkomitmen serius untuk terus memberikan pelayanan yang cepat dan mudah. Inovasi yang dilakukan Kelurahan Gunung Telihan ini bagus. Memudahkan pelayanan dan pelayanan bisa meningkat," kata Adi.

Untuk mengimbangi teknologi yang digunakan, Adi menyarankan agar kelurahan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah bisa tercapai. "Saya harap bila dana sudah ada bisa cepat dilakukan. Pada kesempatan ini juga saya berharap akan banyak inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bontang," pungkasnya. K Humas Pemko Bontang

"Si Cantik" dari Balikpapan

PEMERINTAH Kota (Pemko) Balikpapan, Kalimantan Timur, terus melakukan inovasi guna mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Untuk itu, awal Desember 2015, Pemko Balikpapan meluncurkan program Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu untuk Publik yang disingkat dengan nama "Si Cantik". Selama ini, proses perizinan di Kota Balikpapan dinilai masih harus melalui banyak tahap dan memakan waktu lama sehingga terkesan birokratis.

Peluncuran program "Si Cantik" ini diinisiasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan. Peluncuran program "Si Cantik" dilakukan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di ruang pertemuan BPMP2T Jalan RE Martadinata Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPMP2T Kota Balikpapan Elvin Junaidi, menjelaskan, dengan adanya program ini, masyarakat Balikpapan yang ingin mengajukan permohonan perizinan dapat mengetahui di mana posisi berkas permohonan yang telah diajukan. "Dengan adanya 'Si Cantik' ini, juga memberikan transparansi terhadap proses perizinan serta memudahkan integrasi *database* dengan aplikasi unit kerja lainnya karena berbasis *web*," jelas Elvin.

Menurutnya, BPMP2T telah mengembangkan aplikasi perizinan menjadi berbasis *web programming* melalui "Si Cantik" ini sejak pertengahan 2014. "Si Cantik" merupakan program aplikasi yang pertama kali dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai bentuk dukungan terhadap *E-Government*. Setelah melalui uji coba, perbaikan, dan pengembangan, maka mulai 3 Agustus 2015 program "Si Cantik" sudah digunakan untuk izin gangguan sebagai motor dan merupakan dasar bagi perizinan yang lain, "Kelak, secara bertahap izin yang lain tengah di uji coba dan akan beralih ke aplikasi 'Si Cantik' ini," tandas Elvin.

Dipaparkan Elvin, menjelaskan "Si Cantik" merupakan program yang meliputi *input-prosesing-output* perizinan, mulai dari pendaftaran, penjadwalan peninjauan, peninjauan lapangan, entri data, pembayaran, sampai pencetakan izin. Dengan program aplikasi ini, pemohon dapat mengetahui proses izin telah sampai pada tahap apa dengan melakukan *tracking online* di *website investasi.balikpapan.go.id*. "Pemohon dapat melakukan pengecekan melalui dua cara, yaitu pemohon memasukkan nomor pendaftaran yang ada di tanda terima izin pada *website investasi.balikpapan.go.id* atau dengan melakukan Scan QR barcode di tanda terima dengan menginstal terlebih dahulu scanner barcode pada perangkat smartphone," ujar Elvin.

Dijelaskan juga, BPMP2T akan melakukan berbagai inovasi dengan mengembangkan *SMS Gateway* untuk pemberitahuan proses izin, pendaftaran izin secara *online*, serta e-arsip (digital).

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, menegaskan, hadirnya pelayanan ini akan mengubah pola pelayanan selama ini yang berbelit, menjadi pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. "Saat ini zaman sudah berubah. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat. Saya harap pelayanan bisa lebih baik dan efisien," ujarnya. K Humas Pemko Balikpapan

Air Kran di Makassar Siap Minum

MENGIKUTI kota-kota modern di dunia, Pemerintah Kota (Pemko) Makassar, Sulawesi Selatan, mulai meluncurkan air kran siap minum. Tahap pertama, peluncuran air kran siap minum dilakukan di tiga titik di Kota Makassar, yakni di Anjungan Pantai Losari, Taman Macan, dan Lapangan Karebosi.

Peresmian air kran siap minum tersebut dilakukan Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto di Taman Macan, jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, pertengahan November 2015. Air kran siap minum ini disiapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar, mengatakan, penyediaan kran air siap minum menjadi bagian kecil yang akan memantapkan Makassar sebagai kota dunia. Fasilitas kran air siap minum ini mirip dengan fasilitas yang ada di Bandara Changi, Singapura.

"Kota dunia itu adalah kota yang memperhatikan masyarakat-

nya. Penyediaan kran siap minum ini akan mempermudah warga yang berolah raga di taman ini. Adanya kran ini akan menyempurnakan fasilitas publik, sehingga Makassar bisa jadi kota dunia. Setelah tiga titik ini, akan menyusul lagi di fasilitas publik lainnya di Makassar," ujar Danny.

Direktur Utama PDAM Kota Makassar Haris Yasin Limpo, mengungkapkan, biaya yang digelontorkan untuk satu unit anjungan fasilitas air siap minum dibutuhkan dana sekitar Rp 30 juta. Untuk pengadaan tiga fasilitas air siap minum tersebut anggarannya mencapai Rp 100 juta.

"Bahan untuk instalasi air siap minum menggunakan logam *stainless steel*. Proses pembangunan instalasi mengacu kepada standar Kementerian Kesehatan. Jadi, kami berani jamin airnya sehat. Jumlahnya tidak terbatas, asalkan tidak diambil pakai galon," ujarnya. K Humas Pemko Makassar

Kota-kota Peraih Adipura 2015

SEPERTI tradisi tahun-tahun sebelumnya, akhir November 2015 pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menganugerahkan Adipura untuk kota-kota di Indonesia dengan empat kategori. Penganugerahan dilakukan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Penganugeraha Adipura 2015 ini mengalami pemunduran beberapa kali. Pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, penghargaan Adipura diumumkan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (tanggal 5 Juni), berbarengan dengan penyerahan penghargaan Kalpataru dan Sekolah Adiwiyata. Namun, untuk tahun ini, pengumuman kota peraih adipura baru dilaksanakan November.

Peraih Anugerah Adipura 2014-2015 terbagi dalam empat kategori, yaitu Kota Peraih Anugerah Adipura Kencana sebanyak tiga kota; Kota Peraih Anugerah Adipura sebanyak 65 kota yang terdiri atas 5 kota kategori kota metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 25 kota kategori kota sedang, dan 32 kota kategori kota kecil; Kota Peraih Sertifikat Adipura sebanyak 69 kota, yaitu 1 kota kategori kota metropolitan, 3 kota kategori kota besar, 18 kota kategori kota sedang, dan 47 kota kategori kota kecil; dan Kota Peraih Plakat Adipura sebanyak 17 kota.

Kota Peraih Adipura Kencana 2015

1. Surabaya; untuk kategori Kota Metropolitan.
2. Balikpapan; untuk kategori Kota Besar.
3. Kendari; untuk kategori Kota Sedang.

Kota Peraih Anugerah Adipura 2015 Kategori Kota Metropolitan

1. Kota Tangerang, Banten
2. Kota Palembang, Sumatera Selatan
3. Kota Semarang, Jawa Tengah
4. Kota Bandung, Jawa Barat
5. Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Kota Peraih Anugerah Adipura 2015 Kategori Kota Besar

1. Kota Malang, Jawa Timur
2. Kota Denpasar, Bali
3. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Kota Peraih Anugerah Adipura 2015 Kategori Kota Sedang

1. Kota Jambi, Jambi
2. Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
3. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
4. Kota Palopo, Sulawesi Selatan
5. Kota Probolinggo, Jawa Timur
6. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur
7. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
8. Kota Gorontalo, Gorontalo
9. Kota Pasuruan, Jawa Timur
10. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
11. Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
12. Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan
13. Kota Madiun, Jawa Timur
14. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
15. Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
16. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
17. Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
18. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
19. Kota Cimahi, Jawa Barat
20. Kota Bitung, Sulawesi Utara
21. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
22. Kota Blitar, Jawa Timur
23. Kota Magelang, Jawa Tengah
24. Kota Bontang, Kalimantan Timur
25. Kota Jayapura, Papua Sedang

Kota Peraih Anugerah Adipura 2015 Kategori Kota Kecil

1. Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng
2. Badung, Kabupaten Badung, Bali
3. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

4. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
5. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
6. Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
7. Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Lampung
8. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
9. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
10. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
11. Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan
12. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
13. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
14. Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
15. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
16. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
17. Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimanatan Selatan
18. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
19. Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
20. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
21. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
22. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
23. Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
24. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi
25. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
26. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
27. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
28. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
29. Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat
30. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
31. Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
32. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua

APBD Parepare Tembus Rp 1,2 Triliun

KOTA Parepare, Sulawesi Selatan, membuat sejarah baru. Mulai 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare tembus Rp 1,2 triliun. Hal itu menempatkan kota berpenduduk 139 ribu jiwa ini sebagai salah satu daerah di Sulsel dengan APBD tertinggi.

APBD tersebut telah disepakati Pemerintah Kota (Pemko) Parepare dengan DPRD setempat dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, akhir November. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Sjamsu Alam.

Peningkatan signifikan APBD Kota Parepare terjadi karena bertambahnya dana-dana pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada 2016 dipatok Rp 137 miliar dan pos dana perimbangan yang mencapai Rp 676 miliar lebih. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan Rp 462 miliar lebih, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 206 miliar lebih, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 179 miliar lebih. Secara umum, APBD Kota Parepare tahun 2016 meningkat sebesar Rp 58,94 miliar lebih atau sebesar 5,85 persen bila dibandingkan APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 949,46 miliar.

Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, dalam sambutan pengesahan APBD 2016 mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kota Parepare menetapkan APBD tepat waktu tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kemitraan yang baik dengan Dewan. Dengan demikian, ini juga merupakan kali pertama dalam sejarah Parepare penetapkan APBD dilakukan pada bulan November. Di era-era sebelumnya, APBD Kota Parepare paling cepat disahkan bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Berkaitan dengan nilai APBD yang menembus angka Rp 1,2 triliun, Taufan tak menampik jika hal tersebut merupakan buah dari kerja-kerja ekstra yang dilakukan seluruh jajarannya,

serta komitmen dirinya untuk terus meningkatkan pundi-pundi pendapatan daerah, termasuk dari sektor PAD yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Ia optimis dengan kebijakan anggaran yang ditempuhnya.

Ia berharap APBD Kota Parepare yang cukuf fantastis ini dapat menghasilkan kerja-kerja fantantis juga. "Saya tidak mau APBD sebesar Rp 1 triliun tidak dikawal dan tidak punya gaung yang baik, tentunya dengan tetap mengacu pada taat azas, taat administrasi, dan taat penganggaran," tegas Taufan Pawe.

Secara umum kata dia, pengelolaan keuangan Kota Parepare telah menunjukkan tren yang baik. Selain berhasil keluar dari *disclaimer*, kota ini berhasil dianugerahi dua kali opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Target tahun 2016 Kota Parepare harus meraih opini WTP," ujarnya. Ia menilai target ini cukup realistis. Sebab, dalam catatan BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Parepare 2014 yang disampaikan Juni 2015, disebutkan bahwa tinggal satu temuan yang mesti diperbaiki Kota Parepare. K Humas Kota Parepare

Suasana Kota Jambi.

Berbenah, Kota Jambi Siap Sambut Munas Apeksi 2016

Pemerintah Kota Jambi terus melakukan berbagai persiapan untuk menyambut penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2016. Dijamin, akan lebih baik dari pelaksanaan Munas tahun-tahun sebelumnya.

Kota Jambi, di Provinsi Jambi, ditetapkan sebagai tuan rumah Munas APEKSI 2016 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Ambon 7 Juli 2015. Sejak itu, Pemerintah Kota (Pemko) Jambi sebagai Panitia Munas dua kali melakukan koordinasi dengan pengurus APEKSI. Pertemuan pertama dilakukan di Kota Jambi untuk membahas persiapan Munas APEKSI tersebut. Koordinasi sempat terhenti selama terjadi bencana asap menyelimuti Pulau Sumatera. Setidaknya, selama kurang lebih tiga

bulan, Panitia Munas APEKSI Pemerintah Kota Jambi dan Panitia APEKSI Pusat baru melakukan pertemuan kedua di Hotel Aston Rasuna, Jakarta pada awal November 2015. Pertemuan koordinasi pada November itu dihadiri Panitia Pusat dan Panitia Munas APEKSI dari Pemko Jambi.

Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, mengakui, memang agak sulit melakukan koordinasi persiapan Munas APEKSI 2016 ini dikarenakan wilayah Jambi dalam dua bulan terkahir diselimuti kabut asap. Untuk mengejar persiapan acara yang cukup strategis ini, akhirnya panitia harus bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan agenda Munas. Selain menyikapi isu-isu strategis perkembangan perkotaan, salah satu agenda strategis Munas adalah memilih Ketua dan Dewan Pengurus APEKSI Periode 2016-2020.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

Sarimun Hadisaputra menjelaskan, *round down* acara inti Munas APEKSI di Kota Jambi tak berbeda dengan program yang rutin dilakukan di setiap Munas. Misalnya, menyikapi isu-isu terkini yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kota. Di antaranya adalah strategi menghadapai pelaksanaan otonomi paska terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alasannya, UU tersebut hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga dalam penerapannya muncul banyak masalah.

Dalam penyelenggaraan Munas ini, menurut Sarimun, APEKSI pusat hanya mengurusi agenda inti. Untuk agenda lainnya diserahkan kepada Pemko Jambi sebagai tuan rumah. Seperti, agenda *city expo*, penanaman pohon yang dilakukan para wali kota sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim, pentas seni budaya setiap kota, akomodasi penginapan, dan lainnya.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha, menegaskan, pihaknya siap menjadi tuan rumah Munas APEKSI 2016. Bahkan, ia menjamin pelaksanaannya akan lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Ambon. Berbagai persiapan telah Pemko Jambi, misalnya, yang berkaitan dengan akomodasi, transportasi, wisata kuliner, dan lokasi wisata. Bahkan, untuk meramaikan acara Munas APEKSI di Kota Jambi ini, Wali Kota Syarif Fasha berencana mengundang motivator ternama Mario Teguh untuk memberikan motivasi dalam acara *Ladies Program*. "Ini daya tarik sendiri agar semua peserta mau hadir di Kota Jambi," terangnya.

Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra.

Beberapa persiapan lain juga telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan *city expo*, kirab budaya, dan sebagainya. Pawai kesenian rencananya akan ditempatkan di satu tempat pinggir Sungai Musi. Ini pilihan tempat yang sangat strategis agar masyarakat Kota Jambi dan sekitar dapat menikmati semua acara yang diselenggarakan para wali kota seluruh indonesia. Khusus untuk penanaman pohon akan dilakukan di tempat peninggalan budaya yang agak gersang karena tidak di tumbuhi pepohonan.

Wali Kota Syarif Fasha memastikan kotanya siap menjadi tuan rumah Munas APEKSI. "Dari sisi infrastruktur kami telah siap," tegasnya. Tetapi, lanjutnya, kesiapan tersebut juga masih harus ditunjang pembelajaran dari kota yang telah menjadi tuan rumah seperti Ambon. Sebab, kesiapan tidak hanya diukur dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia, tetapi juga berhasil membuat terobosan. Diharapkan, Munas APEKSI Tahun 2016 ini mampu menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan menata perkotaan lebih baik. K

Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Peserta Bimtek Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, di Hotel Oria, Jakarta, 25-26 November 2015,

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah kota (pemko), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Bimtek ini terlaksana atas kerja sama dengan media Indonesia Komunitas-yang merupakan unit usaha harian nasional *Media Indonesia* yang bergerak di bidang *training, in house training*, Bimbingan Teknis, *public training, gathering* dan kerjasama publikasi.

Bimtek dilaksanakan di Hotel Oria, Jakarta, 25-26 November 2015, dan diikuti 46 peserta, sebanyak 44 dari pemerintah kota dan 2 dari kabupaten. Bimtek ini juga atas komitmen pimpinan dan pengelola Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menandatangani surat "Deklarasi Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual" pada tanggal 12 September 2013 di Jakarta. Deklarasi itu menjadi suatu bentuk komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih dan transparan melalui pelaporan keuangan berbasis akrual untuk mencapai opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam Bimtek yang berlangsung dua hari ini, dihadirkan dua nara sumber, yaitu Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin dan Konsultan Keuangan Daerah yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Deddi Nordiawan.

Oleh nara sumber, peserta Bimtek diberi materi tentang gambaran umum standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, konsep dan siklus akuntansi. Khusus untuk prosedur akuntansi, materi yang diberikan dimulai dari pengakuan dan pencatatan atas pendapatan, beban, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, penyusutan, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban, koreksi kesalahan, sampai laporan konsolidasi. Tidak ketinggalan prosedur penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan PPKD. Dalam seksi Bimtek ini peserta dibuatkan simulasi pembuatan laporan keuangan pemerintah kota.

Penerapan akuntansi keuangan berbasis akrual di semua lini pertanggungjawaban keuangan negara dan atau daerah ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini mengatur pengelola keuangan pemerintah menyajikan laporan akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan – yang berupa laporan kinerja keuangan dan laporan operasional. Di mana, laporan keuangan di masa lalu hanya berfungsi sebagai alat pembebas tanggung jawab keuangan dan laporan operasional sebagai bahan penentuan pembagian tantiem/jasa produksi/bonus.

Sebagaimana diketahui, tahun 2015 ini merupakan tahun batas akhir implementasi SAP berbasis akrual. Tenggang waktu ini sebenarnya cukup lama, sebab Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan operasional telah diterbitkan sejak 2010, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mengingat, ta-

hun 2015 merupakan batas akhir, tak heran banyak pemerintah daerah berlomba untuk memenuhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan PP tersebut.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, diatur ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun sejak UU ini diterbitkan. Artinya, paling lambat penerapannya pada 2008. Namun, dalam prakteknya di lapangan ternyata masih banyak masalah yang harus dibereskan lebih dulu, mulai dari standar akuntansi keuangan pemerintah yang baru disahkan tahun 2010 melalui PP Nomor 71 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam standar ini pun masih diberikan kelunakan bila entitas belum mampu menerapkan laporan keuangan berbasis akrual secara penuh. Di situ, entitas pelapor masih dapat menerapkan PSAP berbasis akrual kas menuju akrual. Kelunakan ini diberikan tenggang waktu sampai empat tahun atau tepatnya 31 Mei 2014. Terhitung sejak itu, pemerintah kota harus menerapkan laporan keuangan berbasis akrual secara penuh.

Ada kekhawatiran dari para pimpinan dan pengelola keuangan negara, baik pusat maupun daerah, target tersebut tidak tercapai. Sebab, peralihan dari kas basis menuju akrual dan beralih ke basis akrual penuh memang tidak mudah dan sederhana. Pada September 2013, dideklarasikan implementasi penyusunan keuangan berbasis akrual. Deklarasi itu menjadi suatu bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, dan transparan melalui pelaporan keuangan berbasis akrual untuk mencapai opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk peralihan dari kas basis menuju *full* akrual basis dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang andal dengan kompetensi yang tinggi. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam konteks daerah, pengakuan dan pencatatan transaksi akuntansi pada basis akrual adalah, Pendapatan diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas daerah. Sedangkan, Belanja diakui/dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas daerah. Sementara itu, Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Adapun, Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Direktur Eskekutif APEKSI, Sarimun Hadisaputra membuka pelaksanaan Bimtek, 25 Nopember 2015

Kelebihannya, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, juga menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah. Dengan akuntansi berbasis akrual, pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah dapat dikelola menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual langkahnya menyusun bagan akun standar yang isinya anggaran, pelaksanaan anggaran, neraca, operasional. Untuk ketiga butir terakhir ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011, ditetapkan kebijakan akuntansi yang mencakup penyusutan aset, pencadangan piutang tak tertagih, dan kapitalisasi belanja. Sedangkan, sistem akuntansi yang akan digunakan untuk membukukan transaksi ditentukan terlebih dahulu model jurnal yang akan dipakai dan memastikan apakah sudah diperlukan Sistem Informasi Manajemen.

Melalui Bimtek ini, peserta diberi pemahaman yang tepat bagaimana pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel. Sehingga, laporan yang disampaikan ke publik memiliki tingkat prediktif dan prospektif, sebab informasi laporan keuangan yang disampaikan lebih informatif. Dengan demikian, laporan keuangan SKPD yang merupakan akhir dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bisa menjadi tolok ukur dari penilaian kinerja Kepala SKPD.

Penerapan akuntansi keuangan berbasis akrual ini menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit keuangan. Variabel yang diaudit meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan mengikuti Bimtek ini, jajaran dan SKPD di setiap pemerintah kota memiliki pengetahuan untuk mengaplikasikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual untuk Pemerintah. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota didukung SDM yang handal, sebab melalui Bimtek ini SDM menjadi terampil menyusun laporan keuangan pemerintah kota.

Mencari Solusi Jaminan Kesehatan di Daerah

Suasana Rapat Teknis APEKSI tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah masih banyak menyimpan masalah. Diperlukan solusi yang tepat agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin terjamin.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Jakarta, 22 Oktober 2015. Tema yang diangkat adalah "Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Daerah". Rakernis ini diikuti para pejabat pemerintah kota dari seluruh Indonesia, mulai sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, hingga kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang membidangi masalah kesehatan.

Hadir sebagai nara sumber dalam Rakernis ini adalah Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati W dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Heru Hariadi. Sri Endang membawakan makalah berjudul "Peran dan Fungsi BPJS di dalam Implementasi Integrasi Jamkesda". Sedangkan, Heru Hariadi menyampaikan makalah dengan judul "Strategi Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Paska-Pemberlakuan JKN". Selain itu, hadir Wali Kota Bogor Bima Arya dan Asisten Pemerintahan Kota Tangerang H Tabrani yang menyampaikan pengalaman masing-masing kota dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan di daerah.

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati W

Rakernis ini bertujuan untuk mencari penjelasan kebijakan nasional pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan JKN serta standar pelayanan medik (SPM) bidang kesehatan paska diberlakukannya sistem ini. Selain itu, juga untuk memperoleh penjelasan yang tegas berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menjalankan JKN di daerah. Bagaimana strategi pengelolaan rumah sakit daerah (RSD) paska pemberlakuan JKN juga dibicarakan dalam Rakernis ini.

Pelaksanaan Rakernis ini didasarkan pada kenyataan bahwa implementasi penyelenggaraan JKN ternyata masih banyak menghadapi masalah dan kendala. Semula, penyelenggaraan JKN didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setelah UU tersebut terbit, pemerintah menggulirkan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan sebutan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Implementasi program Jamkesmas mengacu pada prinsip-prinsip asuransi sosial. Penyelenggaraan program ini melibatkan beberapa pihak, yaitu Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan), Pemerintah Daerah, Pengelola Jaminan Kesehatan (PT Askes), dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan dengan biaya dan mutu yang terkendali.

Dalam praktiknya di lapangan, penentuan peserta Jamkesmas didasarkan pada kuota untuk tiap kabupaten/kota. Penentuan kuotanya didasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2006. Masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kuota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dari sini kemudian muncul program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Karena kemampuan keuangan daerah berbeda-beda, tentu berbeda-beda pula pelayanan kesehatan melalui program Jamkesda ini.

Pada perkembangannya, pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU ini mengamanatkan adanya dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai operasional secara nasional pada 2014. Dengan berlakunya BPJS Kesehatan, maka sistem jaminan kesehatan masyarakat yang ada sebelumnya tidak berlaku. Proses pengintegrasian sistem jaminan kesehatan yang lama ke dalam JKN yang diselenggarakan BPJS inilah yang masih bermasalah di berbagai daerah.

Hal tersebut juga diakui Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati W. Menurutnya, belum semua layanan jaminan kesehatan memang dapat terintegrasi ke dalam JKN BPJS meskipun regulasi, sistem, dan dananya tersedia. Salah satunya karena ketidakakuratan data warga miskin di daerah, termasuk di kota.

"Untuk itu BPJS membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah kota untuk meng-*update* data yang akurat, agar data yang ada di BPJS dapat diperbaiki dan ter-*update* dengan baik," ujar Sri Endang.

Wali Kota Bogor Bima Arya.

Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengakui, tidak mudah mengintegrasikan sistem layanan jaminan kesehatan yang lama ke dalam JKN yang dikelola BPJS. Menurutnya, ada tiga tahap yang harus dilalui. Pertama, yang paling krusial adalah pendataan. Disebut krusial karena jika pendataannya tidak akurat, maka proses selanjutnya pasti akan bermasalah. Tahap berikutnya adalah proses pengintegrasian data ke dalam JKN. Dan, yang terakhir adalah bagaimana dampak serta implikasinya terhadap pelayanan jamiman kesehatan di daerah.

"Program ini merupakan program yang paling dekat dengan keseharian warga. Yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari pemerintah kota, salah satunya adalah kesehatan," ujar Bima Arya.

Dia menjelaskan, skema jaminan kesehatan di Kota Bogor telah dimulai sewaktu dilakukan langkah-langkah implementer pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin tahun 2005.

Salah satu upayanya adalah dengan membuat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan validasi data yang ternyata masih ada 37 ribu warga yang memiliki jaminan ganda (jamkesmas dan jamkesda). Karena itu, pada Mei 2013, teridentifikasi bahwa telah ada kartu jamkesda sebanyak 166 ribu yang telah terdistribusi ke masyarakat, namun masih terus dilakukan updating data agar tidak terjadi kesalahan dan duplkasi data. "Dan diharapkan pada 2016, peserta Jamkesda terintegrasi dengan JKN," tegas Bima Arya. Ia berharap proses pengintegrasian program JKN ini dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Tangerang Tabrani menceritakan Pemerintah Kota Tangerang dalam membangun sistem jaminan kesehatan bagi warga miskin. Dimulai pada 2008, program dimaksud disebut Program Multiguna. Belakangan, program tersebut tidak hanya dikhususkan bagi warga miskin. Program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah 1,9 juta jiwa seluruh dijamin oleh Pemko Tangerang. Untuk mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan muncul terkait dengan program ini, Pemkot Tangerang mengeluarkan beberapa regulasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara terstruktur dan berjenjang. Sejak 2008 sampai 2014, Pemko Tangerang telah bekerja sama dengan program Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang dengan 36 rumah sakit di Jakarta. "Namun, di 2015, posisi kerja sama hanya sampai 22 RS karena ada beberapa RS yang belum memiliki sistem JKN," ujar Tabrani.

Untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan yang terjadi di berbagai daerah, Sekjen ARSADA Heru Hariadi, menyarankan agar pengelolaan badan layanan umum di daerah yang berkaitan dengan keuangan bisa lebih fleksibel. Selain itu, harus dilakukan akreditasi terkait mutu pelayanan jaminan kesehatan di daerah. Dalam implementasi JKN, menurut Heru, harus dibarengi dengan sistem kendali mutu dan sistem kendali biaya. "Ini akan menjamin kesuksesan sistem JKN," kata Heru Hariadi.

Setelah melalui sesi diskusi, peserta dibagi ke dalam kelompok untuk merumuskan rekomendasi. Kelompok 1 yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi bertugas merumuskan rekomendasi tentang evaluasi mekanisme penyelenggaraan JKN dan perbaikan pelayanan dan implementasinya di daerah. Sedangkan, kelompok 2 yang dipimpin Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung Exsenveny L bertugas menyusun rekomendasi tentang usulan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembagian Urusan dan Standar Pelayanan Medik Bidang Kesehatan.

Kelompok 1, misalnya, karena memandang masih ada masalah pendataan, merekomendasikan agar pemerintah membentuk tim validasi data yang dipimpin dinas sosial di tiap daerah. Kelompok 1 juga memandang sosialisasi JKN belum optimal. Karena itu, direkomendasikan BPJS lebih aktif lagi memberikan sosialisasi sampai ke tingkat *grass root*, antara lain berkaitan dengan masalah kepesertaan, prosedur, layanan, alur rujukan, hak dan kewajiban peserta dan pemberi layanan. Sistem rujukan diusulkan juga harus mempertimbangkan kondisi geografis.

Sementara itu, kelompok 2 membuat sejumlah rekomendasi, di antaranya pemerintah harus segera menerbitkan petunjuk teknis perizinan bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga direkomendasikan adanya kebijakan untuk menyusun *unit cost* SPM bidang kesehatan dan program pemerintah yang berhubungan dengan JKN harus didanai oleh negara (pemerintah pusat). Yang juga penting rekomendasi dari kelompok 2 adalah agar peraturan dari BPJS harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Ini untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang berlaku di daerah.

Salah satu pembicara Program Urban Nexus.

Urban Nexus, Program Pembangunan Kota Terpadu

Perkotaan di Indonesia dan di Asia masih menghadapi ketahanan energi, air, dan pangan. Perencanaan program pembangunan yang terpadu adalah solusinya.

Dua kota di Indonesia, yaitu Pekanbaru di Provinsi Riau dan Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau terpilih untuk menjalankan proyek pengelolaan sumber daya perkotaan terpadu melalui program *Urban Nexus*. Proyek *Urban Nexus* merupakan program Kementerian PPN/ Bappenas bekerja sama dengan *Gesellschaft fur Internationale Xusammenarbeit* (GIZ). Kerja sama diteken sejak 2014. Kedua kota ini lolos seleksi dan menyisikan kota lainnya. Semua kegiatan program *Urban Nexus* di dua pemerintah kota ini dibiayai oleh GIZ. GIZ adalah organisasi internasional bidang pembangunan dan pelestarian lingkungan yang berbasis di Jerman.

Untuk memulai Proyek *Urban Nexus*, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Tanjungpinang) telah membentuk *task forces* (gugus tugas) yang bertugas mengawal proses identifikasi proyek dan elaborasi (pra) studi kelayakan infrastruktur lintas sektoral yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perkotaan.

Di Kota Pekanbaru, prioritas kerja sama di bidang pengelolaan sampah dan air limbah di sepanjang Sungai Siak. Sementara, yang menjadi prioritas Kota Tanjungpinang

lebih ke pengelolaan air limbah yang inovatif serta pengelolaan limbah padat di Kabupaten Senggarang, yang terletak di pinggir laut. Kedua kota telah berpartisipasi aktif dalam Pelatihan Komprehensif TPA Manajemen di Chiangmai, Thailand selama tiga hari pada Februari 2015. Pelatihan dimaksud merupakan bagian dari pembelajaran *peer-to-peer*, begitu juga dalam loka karya Pelatihan Teknis Pengelolaan Air Limbah yang inovatif di Bangkok, Thailand, pada bulan yang sama.

Dalam salah satu kegiatan Program *Urban Nexus,* dilaksanakan loka karya yang menghadirkan peserta dari perwakilan kota-kota berbagai belahan dunia untuk memaparkan perkembangan pembangunan di masing-masing wilayah. Pada loka karya di Filipina itu, Pemko Tanjungpinang memberikan pemaparan mengenai perkembangan proyek *Urban Nexus*, termasuk masalah kendala yang dihadapi serta keuntungan yang diharapkan dari terlaksananya proyek tersebut.

Tanjungpinang menjadi percontohan pertama dari lima kabupaten dan kota se-Indonesia untuk pembangunan berbasis ramah lingkungan. Kota yang terpilih menjadi target program tersebut akan mendapat bantuan bimbingan teknis dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya perkotaan yang terintegrasi, terutama dalam pengelolaan air limbah, penyediaan air baku, pengelolaan sampah, transformasi energi terbarukan, dan efisiensi energi dalam rancangan konstruksi bangunan.

Pada Oktober 2015, di Tanjungpinang digelar loka karya *Urban Nexus* berupa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas *Urban Nexus*. Loka karya ini diikuti 40 peserta dari perwakilan dua kota, yaitu peserta dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Tanjungpinang (Tim *Urban Nexus*), antara lain Bappeda, BLH, KP2KE, PU, serta peserta dari Kecamatan Tanjungpinang Kota, serta Kelurahan Senggarang. Mereka mengulas dan mendiskusikan proyek percontohan di Pekanbaru (pengelolaan limbah padat) dan Tanjungpinang (pengelolaan air limbah yang inovatif di Senggarang Kabupaten dan pengelolaan limbah padat).

Sebagaimana diketahui, kegiatan *Urban Nexus* ini untuk mempromosikan implementasi praktis bagaimana perencanaan dan manajemen pengelolaan sumber daya perkotaan di sektor energi, air, dan ketahanan pangan. Sebab, perkotaan sangat rentan terhadap ketahanan untuk ketiga sektor tersebut. Seperti *Urban Nexus* di Kota Tanjungpinang, dilaksanakan dengan mengintegrasikan infrastruktur ramah lingkungan – yang menjadi bagian infrastruktur perkotaan Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang.

"Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Kota Pekanbaru dan Tanjungpinang, mendapat pendampingan dari GIZ untuk proyek *Urban Nexus*. Senggarang, Tanjungpiang, dipilih menjadi lokasi proyek *Urban Nexus* yang terdapat kawasan permukiman kumuh," ujar Riono, Sekretaris Daerah Tanjungpiang. Pada tahap awal, ada 100 rumah di Senggarang yang akan menerapkan sistem yang dibangun dari *Urban Nexus* dalam bidang pembuangan sampah. Dengan begitu, masyarakat di sana tidak akan membuang limbah ke laut. Sebab, limbah tersebut ditampung dan didaur ulang untuk dimanfaatkan hasilnya. "Limbah tinja akan disedot dan diolah ulang untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi," imbuh Riono.

Urban Nexus adalah suatu pendekatan terhadap rancangan kebijakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pendekatan yang mengarahkan para pemilik kepentingan untuk mengidentifikasi segala aspek di daerahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja kelembagaan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kualitas layanan. Pendekatan yang dilakukan di Indonesia, di antaranya pengenalan teknologi rekayasa yang inovatif di bidang air limbah dan pengelolaan limbah padat, sanitasi lingkungan, pembangkitan energi, jalur ke (urban) pertanian. Selain Indonesia, beberapa negara yang sudah menerapkan *Urban Nexus* adalah China, Mongolia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dengan kebijakan yang diatur sesuai kebutuhan masing-masing. K

MARI KITA SUKSESKAN MUSYAWARAH NASIONAL APEKSI BESERTA KEGIATAN-KEGIATAN PENDUKUNGNYA DI KOTA JAMBI PADA TANGGAL 27-29 JULI 2016

DENGAN TEMA:

"STRATEGI PELAKSANAAN OTONOMI PASCA UU NO. 23 TAHUN 2014"